



BELAJAR DARI TIMOR TENGAH SELATAN

Jejak Transformasi Penghidupan Berkelanjutan,
Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Bentang Lahan
Melalui Kegiatan Land4Lives (2022–2026)

BELAJAR DARI TIMOR TENGAH SELATAN

Jejak Transformasi Penghidupan Berkelanjutan,
Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Bentang Lahan
Melalui Kegiatan Land4Lives (2022–2026)

Penulis (menurut urutan abjad):

Betha Lusiana
Balgies Devi Fortuna
Caecilia Yulita Novia
Dikdik Permadi
M. Fikri Fadhilah
Ni'matul Khasanah
Ratnasari
Suyanto
Thifali Adzani

Editor:

Pijar Anugerah
Andree Ekadinata

© 2026 CIFOR dan ICRAF



Materi dalam publikasi ini berlisensi di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Lusiana B, Fortuna BD, Novia CY, Permadi D, Fadhilah MF, Khasanah N, Ratnasari, Suyanto, Adzani T. 2026. Belajar dari Timor Tengah Selatan: Jejak transformasi penghidupan berkelanjutan, kemandirian pangan, dan pengelolaan bentang lahan melalui kegiatan Land4Lives (2022-2026) (Anugerah P, Ekadinata A, Eds.). Bogor, Indonesia dan Nairobi, Kenya: CIFOR dan ICRAF sebagai Landscape Alliance.

CIFOR
Jl. CIFOR, Situ Gede
Bogor Barat 16115
Indonesia
T +62 (251) 8622 622
F +62 (251) 8622 100
E cifor@landscapealliance.org

ICRAF
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30677, Nairobi, 00100
Kenya
T +254 (20) 7224 000
F +254 (20) 7224 001
E icraf@landscapealliance.org

landscapealliance.org

Landscape Alliance adalah nama operasional dari Center for International Forestry Research (CIFOR) dan International Centre for Research on Agroforestry (ICRAF).

Penggunaan istilah dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak menunjukkan adanya pendapat dari pihak CIFOR dan ICRAF, para mitra, dan lembaga donor; mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota, daerah atau mengenai wewenangannya, atau pemisahan batas-batasnya.

Kata Pengantar Bupati Timor Tengah Selatan

Shalom, Salve, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Bagi masyarakat Timor Tengah Selatan, tanah dan air bukan sekadar sumber penghidupan fisik, melainkan bagian tak terpisahkan dari jati diri dan martabat kami. Di bentang alam yang sarat tantangan iklim semi kering ini, ketangguhan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan hidup. Menjawab tantangan kekeringan dan perubahan iklim menuntut kita untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersatu padu menata ruang hidup dari hulu Gunung Mutis hingga ke hilir pesisir pantai.

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menyambut baik kemitraan strategis bersama ICRAF Indonesia melalui kegiatan Land4Lives, yang didukung oleh Pemerintah Kanada. Kerja sama ini telah membuktikan bahwa keterpaduan antara pengetahuan, kebijakan pemerintah, dan kearifan masyarakat lokal mampu melahirkan perubahan nyata di tingkat desa.

Melalui laporan ini, kita dapat melihat jejak kerja bersama yang membanggakan. Lahan-lahan pekarangan kini lebih hijau dan produktif menopang gizi keluarga, mama-mama kian percaya diri memimpin perubahan melalui Sekolah Perempuan (*Skol Bife*), para petani terhubung dengan peluang usaha yang lebih berdaya saing, serta anak-anak sekolah mulai mencintai pangan lokalnya. Pada saat yang sama, perencanaan daerah kita semakin kokoh dengan lahirnya dokumen tata kelola hutan dan Daerah Aliran Sungai yang terpadu.

Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kanada, ICRAF Indonesia, para mitra lembaga swadaya masyarakat,



serta jajaran perangkat daerah yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi. Penghormatan terdalam saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, kepala desa, dan seluruh masyarakat petani TTS yang senantiasa menjaga tanah tumpah darah ini dengan penuh cinta.

Buku laporan ini merupakan rekam jejak sekaligus modal berharga bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten TTS berkomitmen untuk merawat dan memperluas praktik-praktik baik ini ke dalam kebijakan pembangunan daerah demi terwujudnya masyarakat Timor Tengah Selatan yang mandiri, sejahtera, dan tangguh menghadapi masa depan.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberkati setiap niat baik dan kerja keras kita bagi Bumi TTS tercinta.

Soe, September 2026

Bupati Timor Tengah Selatan,
Eduard Markus Lioe, S.Ip, S.H., M.H.

Kata Pengantar Land4Lives

Perubahan iklim telah menjadi kenyataan yang menguji ketangguhan kita semua. Di wilayah dengan karakteristik semikering seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, fluktuasi iklim berdampak langsung pada denyut kehidupan masyarakat. Menghadapi dinamika ini, pendekatan konvensional dalam pengelolaan sumber daya alam jelas tidak lagi memadai. Kita dituntut melakukan pergeseran paradigma yang mendasar: dari sekadar pemanfaatan lahan menuju pembentukan ketangguhan bentang lahan dan penghidupan.

Ketangguhan bentang lahan berarti memastikan bahwa ekosistem dan manusia di dalamnya tidak hanya mampu bertahan dari guncangan kekeringan dan cuaca ekstrem, namun juga memiliki kapasitas untuk cepat pulih, beradaptasi, dan terus bertumbuh secara mandiri. Sejak tahun 2021, ICRAF Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, para mitra, dan masyarakat berikhtiar menerjemahkan visi tersebut melalui kegiatan *Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods* (Land4Lives), dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC).

Laporan ini merangkum perjalanan lima tahun kerja kolaboratif di Timor Tengah Selatan. Melalui pendekatan berbasis sains terapan, solusi berbasis alam (*nature-based solutions*), serta keadilan gender dan inklusi sosial (GEDSI), Land4Lives bekerja pada dua tingkat yang saling menguatkan: menghidupkan inovasi di tingkat tapak desa dan memfasilitasi tata kelola terpadu pada tingkat bentang lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) Benain dan Noelmina.

Capaian-capaian ini bukanlah kerja sepihak, melainkan buah dari semangat gotong royong. Atas nama ICRAF Indonesia, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati Timor Tengah Selatan beserta seluruh



jajaran Organisasi Perangkat Daerah, serta Yayasan Krisna Galensya dan Yayasan Mitra Tani Mandiri. Terima kasih yang tulus juga kami haturkan kepada para tokoh agama, tokoh adat, para fasilitator desa, dan terkhusus para petani perempuan serta laki-laki di TTS yang telah membuka diri bagi perubahan dan bekerja tanpa lelah merawat tanah leluhur mereka.

Berakhirnya fase Land4Lives pada tahun 2026 bukanlah sebuah titik henti. Ini adalah titik mula penyerahan estafet kemandirian. Fondasi pengetahuan, dokumen perencanaan, kelembagaan pokja, dan kelompok-kelompok usaha berbasis masyarakat yang telah terbangun kini menjadi aset berharga milik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi catatan memori atas apa yang telah dikerjakan, melainkan menjadi kompas dan sumber inspirasi bagi para pengambil kebijakan, mitra pembangunan, dan masyarakat luas untuk terus merajut bentang lahan TTS yang lestari, adil, dan tangguh iklim bagi generasi masa depan.

Direktur ICRAF Indonesia,
Andree Ekadinata

Ringkasan Eksekutif

Land4Lives (2022–2026) berfokus pada perbaikan pengelolaan bentang lahan yang tangguh terhadap iklim serta peningkatan penghidupan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur. Mengingat tingginya ancaman iklim seperti kekeringan, program ini mengubah paradigma pengelolaan lahan dari sekadar “pemanfaatan” menjadi “ketangguhan”, agar ekosistem mampu pulih dari guncangan iklim. Land4Lives diimplementasikan secara terintegrasi pada dua tingkat wilayah: tingkat tapak (desa-desa dampingan) dan tingkat bentang lahan (Daerah Aliran Sungai Benain dan Noelmina).

1. Capaian di tingkat tapak

Fokus intervensi di tingkat tapak adalah memperkuat ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan adaptasi iklim masyarakat secara langsung di tingkat desa.

- **Pertanian Cerdas Iklim (PCI) dan ketahanan pangan:** Land4Lives melatih 802 orang (51% perempuan) terkait budi daya

cerdas iklim, serta membentuk 23 kelompok belajar dan 45 kebun belajar agroforestri. Untuk memperkuat ketersediaan pangan keluarga, 771 rumah tangga didampingi dalam membangun kebun pekarangan, serta didirikan 43 kebun pangan komunal. Selain itu, 1.288 warga telah dididik terkait gizi dan konsumsi pangan lokal (B2SA).



Foto oleh Landscape Alliance



Foto oleh Landscape Alliance

- **Penguatan ekonomi dan akses pasar:** Sebanyak 34 kelompok usaha agroforestri dibentuk dengan 778 anggota (50% perempuan). Program ini memfasilitasi peningkatan kelas usaha melalui legalitas (NIB, P-IRT, Halal, HAKI), serta menghubungkan petani dengan akses pembiayaan inovatif (seperti Dana Desa dan Koperasi) serta jaringan pemasaran komersial.



Foto oleh Landscape Alliance

- **Pemberdayaan gender dan inklusi sosial:** Pembentukan 38 kelompok Sekolah Perempuan (Skol Bife) di 28 desa dengan 812 peserta berhasil meningkatkan kapasitas perempuan sebagai agen perubahan di komunitasnya. Program ini juga melatih 174 fasilitator untuk menjamin keberlanjutan edukasi di tingkat desa.



Foto oleh Landscape Alliance

- **Replikasi dan skalabilitas:** Pengetahuan diperluas melalui 6 Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim (TP2CI). Inovasi program direplikasi di 24 desa baru oleh mitra lokal (Krisna-YMTM) dan diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal di lebih dari 30 sekolah serta layanan rutin di 37 Puskesmas.

2. Capaian di tingkat bentang lahan

Pada tingkat bentang lahan, program memastikan adanya tata kelola ekosistem yang terpadu antarwilayah hulu-hilir melalui perencanaan berbasis sains.

- **Analisis berbasis sains:** Melalui kajian CASAVA (kerentanan komunitas), FLORAS (restorasi spasial), dan SWAT (pemodelan hidrologi), program memetakan area prioritas restorasi. Desain skenario intervensi yang dihasilkan memproyeksikan peningkatan kapasitas penyangga pada DAS Noelmina (7–14%) dan DAS Benain (4–10%).
- **Perencanaan pengelolaan DAS dan kawasan hutan:** Land4Lives memfasilitasi lahirnya dokumen strategis, mencakup 6 dokumen *Management Plan* (MP) sub-bentang lahan, 1 dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH TTS, dan 2 Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) Benain serta Noelmina.
- **Peningkatan kapasitas kelembagaan:** Dibentuk satu Kelompok Kerja (Pokja) Bentang Lahan yang melibatkan 43 anggota dari berbagai pihak. Lebih dari 1.558 pihak pengelola lahan dilatih mengenai Solusi Berbasis Alam (NbS) dan metode pembukaan lahan tanpa membakar.



Foto oleh Landscape Alliance

- **Integrasi kebijakan pemerintah:** Upaya strategis ini secara resmi dimasukkan ke dalam kerangka pembangunan daerah, yaitu 1 dokumen Integrated Area Development (IAD), 3 dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta 2 dokumen RPJMD Provinsi NTT dan Kabupaten TTS.

3. Dampak keseluruhan dan keberlanjutan

Secara agregat, intervensi Land4Lives berkontribusi langsung pada perbaikan pengelolaan bentang lahan seluas 517.125 ha yang kini dikelola secara lebih responsif terhadap gender dan lebih berkelanjutan. Integrasi pendekatan dari tingkat tapak hingga kebijakan strategis telah meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan kesetaraan peran gender. Berakhirnya proyek pada tahun 2026 menjadi titik mula kemandirian bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk melanjutkan estafet pembangunan bentang lahan yang tangguh terhadap iklim di masa depan.







Foto oleh Landscape Alliance

Daftar Isi

Kata Pengantar Bupati Timor Tengah Selatan	v
Kata Pengantar Land4Lives	vii
Ringkasan Eksekutif	ix
Daftar Isi	xv
Bab 1. Tantangan dan Panggilan Aksi	1
1.1 Lokasi upaya penguatan ketangguhan iklim	2
1.2 Tantangan di tingkat tapak.....	2
1.3 Kondisi awal dan tantangan di tingkat bentang lahan	4
1.4 Mengubah Tantangan Menjadi Ketangguhan Bersama.....	5
Bab 2. Transformasi Penghidupan Tangguh Iklim.....	7
2.1 Peningkatan akses pengetahuan budi daya cerdas iklim	7
2.2 Pembentukan kelembagaan unit usaha desa, perbaikan akses ke pembiayaan inovatif dan akses pasar.....	9
2.3 Peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.....	11
2.4 Membangun dukungan multipihak untuk penghidupan tangguh iklim	13
2.5 Pemberdayaan gender dan inklusi sosial melalui sekolah perempuan	16
2.6 <i>Upscaling</i> dan <i>outscaling</i>	17
Bab 3. Menata Bentang Lahan, Membangun Kebijakan Terpadu	27
3.1 Kelompok kerja multipihak pengelolaan bentang lahan berkelanjutan	27
3.2 Penyediaan data dan analisis berbasis sains untuk pengelolaan bentang lahan.....	29
3.3 Peningkatan kapasitas pengelola bentang lahan	35

3.4 Perencanaan pengelolaan kawasan hutan	37
3.5 Perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	39
3.6 Integrasi perencanaan bentang lahan ke program pemerintah.....	41
Bab 4. Jejak Perubahan dan Dampak Nyata	43
4.1 Dampak di tingkat tapak	43
4.2 Dampak di tingkat bentang lahan	45
Bab 5. Arah Keberlanjutan	49

Daftar Gambar

Gambar 1.	Lokasi Land4Lives bekerja	xii
Gambar 2.	Peta sebaran kebun belajar, kebun usaha dan kebun dapur.	24
Gambar 3.	Area Prioritas Restorasi DAS Benain (A) dan Noelmina (B).....	30
Gambar 4.	Area Potensi Resapan Air DAS Benain (atas) dan Noelmina (bawah).....	31
Gambar 5.	Area Rencana Perbaikan Pengelolaan DAS Benain	32
Gambar 6.	Area Rencana Perbaikan Pengelolaan DAS Noelmina	33
Gambar 7.	Persentase Perbaikan Kapasitas Penyangga DAS Benain (kiri) dan Noelmina (kanan) di Berbagai Skenario.....	34

Daftar Tabel

Tabel 1.	Akses ke pembiayaan inovatif dan pasar melalui berbagai bentuk kerja sama.....	15
----------	--	----



Foto oleh Landscape Alliance

01 Tantangan dan Panggilan Aksi

Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dianugerahi bentang alam yang unik dan beragam—membentang dari puncak sakral Gunung Mutis di wilayah hulu hingga dataran rendah pesisir di selatan Pulau Timor. Di tanah ini, denyut kehidupan dan kesejahteraan masyarakat berakar kuat pada keharmonisan alam, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Namun, di balik kekayaan potensi tersebut, TTS berada di garis depan kerentanan krisis iklim. Karakteristik iklim semikering (*semi-arid*) dengan curah hujan yang kian tidak menentu bukan lagi sekadar proyeksi ilmiah, melainkan kenyataan harian yang menguji ketahanan tanah, air, dan penghidupan masyarakat di Bumi Timor.

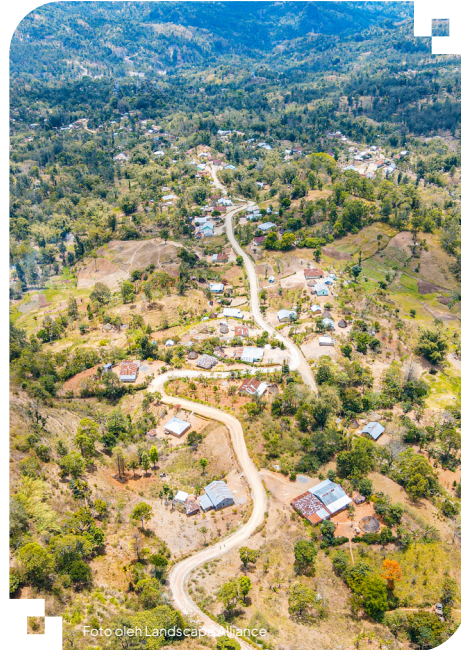


Foto oleh Landscape Alliance

Menjawab tantangan multidimensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bergandengan tangan dengan program Sustainable Landscape for Climate Resilient Livelihood (Land4Lives, 2022–2026)—sebuah inisiatif kolaboratif yang didukung oleh Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) dan dilaksanakan oleh ICRAF, CIFOR bersama mitra konsorsium lokal (Yayasan Krisna Galensya dan Yayasan Mitra Tani Mandiri). Tujuan Land4Lives adalah *peningkatan penghidupan yang tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan iklim serta peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat tertinggal dan rentan, terutama*

perempuan dan anak perempuan, di Indonesia. Kemitraan strategis ini dibangun di atas semangat gotong royong dan kesetaraan peran, menyatukan komitmen jajaran pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, hingga kelompok tani di pelosok desa. Melalui kerja bersama ini, Land4Lives hadir bukan untuk membawa solusi sepihak dari luar, melainkan memfasilitasi aksi terpadu: merajut ketangguhan iklim dari tingkat kebun keluarga (tapak) hingga ke tingkat bentang lahan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penguatan kebijakan daerah.



Foto oleh Landscape Alliance

1.1 Lokasi upaya penguatan ketangguhan iklim

Pendekatan Land4Lives berpijak pada prinsip bahwa kelestarian ekosistem dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan oleh batas-batas administratif semata. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten TTS, Land4Lives bekerja pada beberapa tingkatan wilayah yang saling terhubung, mulai dari desa hingga tingkat bentang lahan di daerah aliran sungai (DAS), dan juga tingkat kabupaten. Pada tingkat desa, kegiatan dilaksanakan di sejumlah desa dampingan, baik oleh ICRAF maupun konsorsium (Krisna Foundation dan YMTM), di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Desa-desanya tersebut tersebar di beberapa wilayah yang mewakili keragaman tipologi agroekologi dan sosial TTS (Gambar 1), antara lain Taneotob, Nunbena, Kuan Noel, Fatukoto, Tunua, Bijaepunu, Lelobatan, Netpala, Kualeu, Oenino, Neke, Pene Utara, Hoi, Bone, Falas, Oe'ekam, dan Oepilki, serta beberapa desa lainnya.

Pada tingkat bentang lahan, Land4Lives bekerja di DAS Benain (327.515 ha) dan DAS Noelmina (189.610 ha), yang mencakup wilayah lebih luas daripada batas administratif Kabupaten TTS. Kedua DAS lintas kabupaten ini berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan utama yang menghubungkan kawasan tangkapan air dan hutan lindung di hulu (seperti kawasan Mutis) dengan pusat-pusat produksi pertanian dan permukiman di hilir.

1.2 Tantangan di tingkat tapak

Sebagai wilayah dengan karakteristik iklim semikering (*semi-arid*), Kabupaten TTS menghadapi ancaman kekeringan yang relatif tinggi. Kondisi iklim tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan air, serta keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat di tingkat tapak. Sumber penghidupan utama masyarakat sebagian besar berasal dari sektor pertanian, kehutanan,

dan perkebunan. Pada sektor pertanian, komoditas yang banyak dikembangkan antara lain berbagai jenis sayuran, jagung, dan buah-buahan. Selain itu, masyarakat juga menggantungkan penghidupannya pada hasil hutan dan kegiatan perkebunan, termasuk komoditas kopi, jeruk, dan alpukat.

Sebagaimana daerah lain di Provinsi NTT, perubahan iklim semakin memperbesar tantangan yang dihadapi masyarakat di TTS, terutama meningkatnya risiko kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan dan mempertahankan produktivitas pertanian.

Kekeringan menyebabkan kondisi tanah menjadi lebih sulit untuk dibudidayakan, sementara keterbatasan air menghambat proses produksi pertanian. Pada kondisi tertentu, tekanan iklim tersebut dapat menyebabkan penurunan produktivitas, bahkan gagal panen, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan, ketahanan pangan, dan keberlanjutan penghidupan rumah tangga.

Beberapa tantangan utama yang masih dihadapi masyarakat dalam meningkatkan ketangguhan penghidupan terhadap perubahan iklim adalah sebagai berikut:

a Keterbatasan akses pengetahuan budi daya cerdas iklim. Pengetahuan dan informasi mengenai praktik budi daya cerdas iklim (*climate-smart agriculture*) belum tersosialisasi secara luas kepada masyarakat. Kondisi ini membatasi kemampuan petani, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menerapkan praktik budi daya yang mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko akibat perubahan iklim.

b Kesenjangan akses pasar dan pembiayaan usaha. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai akses pasar, pengembangan usaha, serta sumber pembiayaan yang dapat mendukung pengembangan usaha berbasis pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Kesenjangan informasi ini dapat lebih dirasakan oleh perempuan, pemuda, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya yang memiliki akses terbatas terhadap jaringan usaha, lembaga keuangan, informasi pasar, serta ruang pengambilan keputusan ekonomi. Keterbatasan ini menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan skala dan keberlanjutan usaha masyarakat.

c Terbatasnya sarana pembelajaran terapan. Ketersediaan plot percontohan (*demonstration plots*) dan lokasi pembelajaran yang dapat digunakan masyarakat untuk melihat dan mempraktikkan secara langsung teknologi serta pendekatan budi daya cerdas iklim masih terbatas. Padahal, lokasi pembelajaran tersebut penting untuk menunjukkan penerapan praktik cerdas iklim yang mendukung peningkatan penghidupan sekaligus memperkuat akses dan ketersediaan pangan rumah tangga. Pelibatan perempuan dan kelompok rentan sebagai peserta dan pengelola plot percontohan menjadi penting agar manfaat pembelajaran tidak hanya meningkatkan produktivitas tapi juga memperkuat akses dan ketersediaan pangan rumah tangga serta pengambilan keputusan yang lebih setara dalam rumah tangga dan komunitas.

d Belum optimalnya penyelarasan teknologi dengan konteks lokal dan pemberdayaan gender. Solusi pertanian yang diperkenalkan sering kali bersifat seragam (*one size fits all*) tanpa mempertimbangkan pembagian peran gender dalam rumah tangga tani maupun kearifan lokal setempat. Perempuan dan laki-laki dapat memiliki pengetahuan, kebutuhan, prioritas, dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan proses adaptasi dan pengujian teknologi di tingkat tapak agar

teknologi yang dikembangkan benar-benar relevan, mudah diterapkan, responsif gender, dan memberikan manfaat yang lebih adil bagi berbagai kelompok masyarakat.

1.3 Kondisi awal dan tantangan di tingkat bentang lahan

Di luar batas pekarangan dan kebun desa, bentang lahan TTS menghadapi dinamika ekologis dan kelembagaan yang kompleks pada skala lanskap hutan dan DAS. Tanpa tata kelola terpadu, degradasi lingkungan di satu kawasan akan memicu efek domino di kawasan lain. Pada awal kegiatan, kondisi tata kelola bentang lahan di TTS ditandai oleh beberapa hal berikut:

- tidak terdapat strategi restorasi yang responsif gender untuk ekosistem terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hutan, serta tidak ada rencana pengelolaan pada tingkat sub-bentang lahan;
- belum adanya kelompok pemangku kepentingan untuk kegiatan restorasi yang secara eksplisit menangani adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; serta
- tidak ada upaya pengembangan kapasitas, serta tidak ada dokumentasi mengenai peserta pelatihan umum terkait pengambilan keputusan penggunaan lahan secara rasional.

Sebelum intervensi kolaboratif ini dimulai, tata kelola bentang lahan di wilayah ini dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural:

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

- Belum terbangunnya mekanisme koordinasi terpadu antarsektor dan antarkabupaten di sepanjang koridor DAS Benain dan Noelmina menyebabkan program perlindungan di daerah tangkapan air hulu sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan di wilayah hilir.
- Rusaknya tutupan vegetasi alami di wilayah hulu memicu penurunan drastis kapasitas resapan air. Akibatnya, wilayah hilir menghadapi ancaman ganda: krisis air bersih dan kekeringan parah pada musim kemarau, serta ancaman erosi dan sedimentasi akibat banjir bandang pada musim penghujan.

Pengelolaan Kawasan Hutan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

- Tingginya ketergantungan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan memicu potensi konflik tenurial dan perambahan lahan yang memerlukan resolusi partisipatif, adil, dan berkepastian hukum.
- Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) memerlukan dukungan data spasial yang mutakhir, analisis daya dukung lingkungan, serta kerangka

kelembagaan yang kuat untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang inklusif dan responsif gender.

Ketiadaan Kerangka Perencanaan Restorasi Berbasis Sains

Belum tersedianya dokumen strategi restorasi bentang lahan dan sub-bentang lahan yang memadukan pemodelan ilmiah (analisis kerentanan, hidrologi, dan spasial) dengan aspirasi masyarakat setempat, serta minimnya forum multipihak formal yang secara konsisten mengawal agenda aksi adaptasi dan mitigasi iklim di tingkat kabupaten.

1.4 Mengubah Tantangan Menjadi Ketangguhan Bersama

Berangkat dari realitas lapangan tersebut, kemitraan Pemerintah Kabupaten TTS bersama Land4Lives meletakkan fondasi transformasi tata kelola yang holistik dan berkelanjutan.

Dengan menghubungkan ikhtiar petani di kebun pekarangan dengan perencanaan strategis di meja para pengambil kebijakan, perjalanan lima tahun Land4Lives di Kabupaten Timor Tengah Selatan dirajut untuk membuktikan bahwa bentang lahan yang tangguh adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.



Foto oleh Landscape Alliance

02 Transformasi Penghidupan Tangguh Iklim

2.1 Peningkatan akses pengetahuan budi daya cerdas iklim

Dalam angka:

16 panduan teknis untuk petani diterbitkan

mencakup 1 pelatihan utama pertanian cerdas iklim (PCI) spesifik untuk konteks NTT dan 15 panduan pendukung tentang Good Agricultural Practices (GAP)



23 kelompok belajar dibentuk di 12 desa dampingan



553 Total anggota aktif (49% perempuan)

sebagai wadah penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa



802 orang terlibat dalam pelatihan PCI

(51% perempuan), di mana 63% peserta menunjukkan kenaikan dalam pengetahuan dan pemahaman teknis



45 lokasi kebun belajar berbasis agroforestri

dikembangkan sebagai wahana belajar kelompok untuk mempraktikkan pertanian cerdas iklim



23 lokasi pembibitan berbasis kelompok

dibangun untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemandirian anggota dalam penyediaan anakan pohon berkualitas



Kegiatan peningkatan akses pengetahuan budi daya cerdas iklim diawali dengan identifikasi opsi peningkatan penghidupan yang berketahanan iklim di 12 desa dampingan yang telah dipilih. Penggalan informasi ini di antaranya dilakukan melalui survei di tingkat rumah tangga melalui Inkubator Peneliti Muda Lansekap (IPML) dan survei inventarisasi kebun untuk memetakan pola jenis tanaman dan penggunaan lahan untuk budi daya.

Desa dampingan Land4Lives:

- **Kec. Mollo Utara:** Netpala, Bijaepunu, Lelobatan
- **Kec. Mollo Tengah:** Kualeu
- **Kec. Nunbena:** Nunbena, Taneotob
- **Kec. Noebeba:** Oepliki, Oeekam
- **Kec. Kie:** Falas
- **Kec. Oenino:** Hoi, Neke
- **Kec. Amanuban Tengah:** Bone

Pertanian cerdas iklim (PCI) digunakan sebagai prinsip utama dalam praktik budi daya di tingkat tapak, menggabungkan strategi adaptasi, mitigasi, serta meningkatkan produktivitas melalui diversifikasi komoditas. Setelah memahami konteks di lapangan, implementasi PCI ini diwujudkan dalam kurikulum dan panduan pelatihan yang spesifik untuk konteks NTT, dilengkapi dengan bahan ajar, poster, dan 15 panduan pendukung tentang *Good Agricultural Practices (GAP)* yang responsif gender.

Peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat desa dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan dalam wadah kelompok belajar. Materi yang disampaikan mencakup:

1. Pengantar prinsip-prinsip dasar tentang PCI dan perancangan agroforestri
2. Persiapan lahan dan sarana produksi secara mandiri: pembibitan, perbanyakan vegetatif, dan produksi pupuk organik

3. Pemahaman kalender tanam berbasis informasi iklim
4. Implementasi praktik budi daya, melalui persiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dan penerapan *Good Agricultural Practices (GAP)*

Dari 4 seri pelatihan PCI, sebanyak 802 orang terlibat langsung (51% perempuan), dengan 63% peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman teknis. Selama kegiatan berlangsung, terbentuk 23 kelompok belajar dengan anggota aktif sebanyak 553 orang (49% perempuan).

Selain pemahaman teori, anggota kelompok belajar juga dibekali wahana dan aset belajar berbasis kelompok untuk mempraktikkan pertanian cerdas iklim, di antaranya 45 lokasi kebun belajar berbasis agroforestri yang dikelola bersama oleh kelompok, 23 lokasi pembibitan berbasis kelompok untuk meningkatkan akses terhadap anakan pohon berkualitas, serta rumah-rumah produksi pupuk organik.



Foto oleh Izhar Ashofie/Landscape Alliance

2.2 Pembentukan kelembagaan unit usaha desa, perbaikan akses ke pembiayaan inovatif dan akses pasar

Dalam angka:

34 kelompok usaha berbasis agroforestri berhasil dibentuk

dengan total anggota **778** individu, di mana **50%** anggotanya adalah perempuan.



1.021 anggota kelompok usaha mengikuti pelatihan usaha

(pengelolaan usaha dan sumber daya manusia, pencatatan keuangan sederhana, dan pembiayaan inovatif), di mana **56%** peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman.



5 skema inisiatif pembiayaan inovatif berhasil diujicobakan

di mana **2** di antaranya disalurkan melalui dinas terkait di tingkat kabupaten.



970 penerima manfaat

(baik anggota kelompok usaha maupun nonanggota kelompok usaha) **berhasil terhubung dengan pasar**, di mana **52%** di antaranya adalah perempuan.



Untuk meningkatkan ekonomi perdesaan yang mandiri, berkelanjutan, serta tangguh terhadap dampak perubahan iklim, diperlukan pendekatan holistik pada tingkat tapak. Langkah strategisnya adalah mengubah potensi alam lokal menjadi produk bernilai jual tinggi melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan. Pemberdayaan ini merangkul berbagai elemen penting di desa: usaha petani/pembudidaya yang membutuhkan pendampingan lanjutan, kelompok perempuan yang berfokus pada kemandirian ekonomi, hingga pemuda sebagai motor penggerak inovasi.

Langkah awal dimulai dari pemetaan komprehensif komoditas unggulan Kabupaten TTS melalui inventarisasi kebun, diskusi warga masyarakat desa (FGD) dan survei pasar secara cepat. Proses ini berhasil memetakan 11 komoditas unggulan Kabupaten TTS untuk dikembangkan lebih lanjut. Setelahnya, kelompok-kelompok usaha baru dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah Desa bersama DPMD setempat sebagai bentuk komitmen bersama anggota kelompok, serta dukungan dari aparat desa setempat dan dinas terkait.

Sebelum benar-benar terjun ke pasar komersial, kelompok usaha dibekali pelatihan intensif. Mereka belajar tata kelola bisnis (termasuk penyusunan rencana bisnis dan AD/ART), pembukuan keuangan, cara mengakses permodalan melalui pembiayaan inovatif, hingga penanganan pascapanen dan peningkatan nilai tambah. Tujuannya agar usaha yang dibangun memiliki fondasi manajemen yang kuat, mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi, dan

kelompok usaha yang terbentuk benar-benar siap menghadapi dinamika pasar secara mandiri dan profesional.

Berbekal keterampilan tersebut, sinergi dengan berbagai dinas terkait berhasil meningkatkan kelas usaha kelompok di tingkat desa. Kolaborasi ini membuahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 6 desa (Hoi, Neke, Falas, Oeekam, Taneotob, dan Nunbena). Kualitas produk juga didongkrak lewat perbaikan kemasan, terbitnya izin PIRT di Desa Hoi, sertifikasi halal di lima desa, bahkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk pupuk organik asal Desa Netpala.

Tantangan permodalan dan pasar turut diselesaikan melalui ekosistem yang terpadu. Dukungan modal mengalir dari skema *closed-loop* mitra pembeli, optimalisasi Dana Desa, hingga bantuan dari DPRD dan instansi tingkat provinsi. Untuk distribusi, dibentuk pusat (*hub*) pemasaran bersama. Hasilnya sangat nyata: petani di Nunbena dan Taneotob berhasil bermitra langsung dengan eksportir kacang tanah lurik, penjualan pupuk organik merambah ke 18 desa di Mollo Utara, dan produk olahan pangan kini sukses menembus gerai premium NTT Mart.

Transformasi dari hulu ke hilir ini membuktikan bahwa masyarakat desa mampu menjadi aktor utama ekonomi daerah jika pemberdayaan dilakukan secara terukur. Keberhasilan ini siap menjadi cetak biru (*blueprint*) bagi desa-desa lainnya. Ke depannya, komitmen seluruh pihak sangat dibutuhkan agar roda kesejahteraan ini dapat terus berputar secara mandiri dan permanen, bukan sekadar berhenti setelah masa program berakhir.



Foto oleh Landscape Alliance

2.3 Peningkatan ketahanan pangan rumah tangga

Dalam angka:

34 kebun pangan komunal dibangun sebagai ruang belajar bersama masyarakat

untuk praktik berkebun berkelanjutan, didukung oleh **8 rumah benih** sebagai pusat penyediaan dan pengelolaan benih lokal.



771 rumah tangga mengembangkan kebun pekarangan

dengan praktik budi daya ramah lingkungan (pupuk organik dan pestisida nabati), sehingga meningkatkan akses terhadap sayuran, buah, dan pangan lokal.



1.288 peserta (61% perempuan)

mengikuti peningkatan kapasitas terkait pangan lokal, gizi seimbang (B2SA dan Isi Piringku), serta ketahanan iklim.



852 petani

mengalami peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan kebun pangan serta penerapan pola konsumsi yang beragam dan bergizi.



Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas rumah tangga di desa dalam memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan yang beragam, bergizi, dan berkelanjutan, serta mengintegrasikannya dengan peningkatan literasi gizi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga sekaligus mendorong perubahan perilaku konsumsi menuju pola makan yang lebih sehat, lebih beragam, dan berbasis pangan lokal.

Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), dibangun 43 kebun pangan komunal sebagai ruang belajar bersama bagi masyarakat untuk mengembangkan praktik berkebun yang berkelanjutan. Pendampingan juga mendorong rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan lahan kosong guna mengembangkan kebun pangan keluarga. Hingga akhir pelaksanaan, 771 rumah tangga telah mengembangkan kebun pekarangan yang meningkatkan akses terhadap sayuran, buah-buahan, dan berbagai sumber pangan lokal. Melalui kebun tersebut, masyarakat mempraktikkan budi daya ramah lingkungan dengan memanfaatkan pupuk organik dan pestisida nabati untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi. Pendampingan juga mencakup berbagai teknik budi daya berkelanjutan, termasuk produksi dan penyimpanan benih, sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk

mengelola kebun secara mandiri. Upaya ini didukung oleh 8 rumah benih yang berfungsi sebagai pusat penyediaan, pengelolaan, dan pembelajaran pengembangan benih lokal, sehingga keberlanjutan kebun dapat terus terjaga.

Penguatan produksi pangan tersebut dipadukan dengan kampanye edukasi gizi yang mengangkat tema pangan lokal, gizi seimbang, dan diversifikasi pangan. Materi kampanye disesuaikan dengan konteks lokal serta mengacu pada konsep B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan Isi Piringku, sehingga lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif melalui diskusi kelompok, demonstrasi, permainan edukatif, serta kegiatan belajar bersama di masyarakat. Hingga akhir pelaksanaan, 1.288 peserta, 61% di antaranya perempuan, mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas mengenai pangan lokal, gizi, dan ketahanan iklim.

Kombinasi peningkatan produksi pangan rumah tangga melalui kebun pekarangan, penerapan praktik budi daya berkelanjutan, dan penguatan literasi gizi telah meningkatkan pengetahuan serta kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga secara lebih mandiri, sehat, dan berkelanjutan. Sebanyak 852 petani tercatat mengalami peningkatan pengetahuan.



Foto oleh Izhar Ashofie/Landscape Alliance

2.4 Membangun dukungan multipihak untuk penghidupan tangguh iklim

Dalam angka:

6 Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim (TP2CI)

pusat pembelajaran berbasis masyarakat yang menyediakan contoh-contoh penerapan yang khas di masing-masing konteks bentang lahan

<https://belajarpcci.lahanuntukkehidupan.id/>



Melibatkan peran serta mitra, mulai dari:

Pemerintah kabupaten, Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, BPP/PPL, UPT KPH, NGO/CSO, Sektor swasta, pelaku usaha, lembaga keuangan, PKK, Karang Taruna, BUMDes, komunitas, Universitas, dan SMK.

>120 petani pelopor pertanian cerdas iklim



Secara keseluruhan, terdapat

- 11** mitra/saluran jaringan pemasaran
- 6** mitra terkait legalitas kelembagaan dan sertifikasi usaha
- 5** mitra sumber pendanaan
- 2** mitra penyalur pendanaan
- 1** mitra penguatan pemahaman mengenai kredit mikro tingkat desa

Berdasarkan kesepakatan multipihak, kumpulan aset-aset belajar di tingkat sub-lanskap kemudian bertransformasi menjadi Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim (TP2CI) yang dikelola oleh para petani pelopor. Saat ini terbentuk 6 TP2CI dengan tema-tema khas yang dikembangkan berdasarkan potensi dan tantangan iklim yang sesuai dengan konteks wilayah masing-masing:

- **TP2CI Mollo Noelmina:** Berfokus sebagai sentra sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, dan ternak yang dikelola dengan mengintegrasikan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat
- **TP2CI Oekita:** Menjadi pusat belajar praktik pertanian ramah lingkungan untuk pertanian berkelanjutan, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati melalui sistem agroforestri
- **TP2CI Mutis:** Berfokus pada komoditas spesifik seperti kacang tanah, porang, sayuran, dan pengolahan madu hutan, serta pengembangan agroforestri sebagai pendekatan kebun menetap
- **TP2CI Amanuban APL:** Lokasi praktik pertanian ramah lingkungan yang dikelola secara berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomis tinggi
- **TP2CI Mollo Benain:** Pusat pembelajaran untuk tanaman hortikultura, pangan lokal, dan perkebunan (kopi) di dalam kawasan hutan guna mendukung ketahanan pangan keluarga
- **TP2CI Noebeba:** Sentra pemanfaatan lahan terpadu yang menghubungkan tanaman hortikultura, perikanan, dan hasil hutan bukan kayu seperti asam

Melalui wadah TP2CI, praktik-praktik baik yang dipelajari di kelompok belajar kemudian diterapkan oleh masing-masing individu dan disebarluaskan kepada anggota masyarakat lain melalui pendekatan *farmer-to-farmer extension*. TP2CI ini dikelola oleh lebih dari 120 petani pelopor yang akan menjadi pemandu dan pemateri dalam kunjungan belajar bagi masyarakat. Mereka dibekali lebih lanjut melalui kegiatan *Training of Trainers* (ToT), mulai dari menyusun model bisnis pembelajaran hingga mempromosikannya kepada calon mitra dan pengunjung.

Dalam pelaksanaannya, TP2CI juga melibatkan peran serta mitra, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, BPP/PPL, UPT KPH Timor Tengah Selatan, NGO/CSO, sektor swasta, pelaku usaha, lembaga keuangan, lembaga agama/gereja, komunitas, universitas, dan SMK. Kemitraan ini terus dibangun hingga saat ini untuk memastikan keberlanjutan kegiatan petani pelopor dalam meneruskan dan menyebarluaskan praktik-praktik baik melalui wadah TP2CI. Pengelolaan pengetahuan serta inspirasi cerita dari praktik baik petani juga disajikan dalam portal informasi TP2CI, belajarpci.lahanuntukkehidupan.id.

Selain itu, dibangun pula akses ke pembiayaan inovatif dan pasar melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Akses ke pembiayaan inovatif dan pasar melalui berbagai bentuk kerja sama

Bentuk kerja sama	Mitra Akses ke Pembiayaan Inovatif dan Pasar
Akses Pasar dan Jaringan Pemasaran	Gudang Paradiso, PT Profil Mitra Abadi (PMA), NTT Mart (Kupang dan TTS), 18 desa di Kecamatan Mollo Utara, beberapa dapur MBG di Kota Soe dan Mollo Utara, DLHK Provinsi, Toko Alsintan Commodor, <i>reseller</i> pupuk individu di Kapan (Ibu Kota Kecamatan Mollo Utara), petani individu di dalam maupun di luar Kecamatan Mollo Utara, sekolah-sekolah (TK–SMA) di Desa Oeekam dan Falas, serta setiap event pameran, festival hari raya keagamaan, atau hari besar nasional di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten TTS
Surat Dukungan Kelompok Usaha, Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk (NIB, Halal, P-IRT & HAKI)	Pemerintah di 12 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten TTS, DPMD TTS, Dinas PPK dan UMKM TTS, DPMPTSP TTS, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT, dan Disperindag Provinsi
Pembiayaan Inovatif untuk Pengadaan atau Perbaikan Sarana dan Prasarana Produksi	Dana Desa, Dana Aspirasi DPRD yang disalurkan melalui Dinas Peternakan dan Dinas TPHP Kabupaten TTS, LHK Provinsi NTT melalui Proklam, PT PMA, serta PPK Desa Neke.
Penguatan Pemahaman Tentang Akses Kredit Mikro Merdeka untuk UMKM (persyaratan dan platform)	Bank NTT



Foto-foto oleh Landscape Alliance

2.5 Pemberdayaan gender dan inklusi sosial melalui sekolah perempuan

Dalam angka:

174 fasilitator



160 perempuan



14 laki-laki

telah terlatih untuk mendampingi dan memfasilitasi sekolah perempuan di Kabupaten TTS.



38 kelompok sekolah perempuan

telah terbentuk di Kabupaten TTS beranggotakan **812** perempuan di **28** desa dan tercatat ada **25** kelompok Skol Bife yang aktif berkegiatan.



682 perempuan peserta sekolah perempuan

telah menyelesaikan pembelajaran dan diwisuda pada September 2026.



Sekolah Perempuan atau disebut *Skol Bife* di Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan media belajar bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami hak-haknya sehingga diharapkan dapat berkontribusi sebagai agen perubahan dalam masyarakat. *Skol Bife* menjadi media untuk memperkuat kepercayaan diri dalam memanfaatkan potensi lingkungan, perubahan, dan program pembangunan agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan serta kelompok rentan lainnya. Dalam prosesnya, *Skol Bife* tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang, relasi dalam keluarga, partisipasi perempuan, serta munculnya berbagai inisiatif pemberdayaan di tingkat komunitas.

Pelaksanaan Sekolah Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sudah berjalan sejak 2018, sejalan dengan upaya menurunkan angka *stunting* dan kasus perdagangan orang. Dinas P3A TTS mencatat bahwa pada 2021 telah terbentuk 8 sekolah perempuan di 8 desa/kelurahan. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil maupun mitra pembangunan menjadi daya ungkit bagi pengembangan sekolah perempuan di Kabupaten TTS.

ICRAF Indonesia melalui program Land4Lives, dengan dukungan dari pemerintah Kanada, mengembangkan model sekolah perempuan di Desa Neke pada 2022 bekerja sama dengan Gereja GMIT Nekamese. Sekolah Perempuan ini



Foto-foto oleh Landscape Alliance

dikenal dengan sebutan *Skol Bife* Nekamese. Selain perempuan, laki-laki pun diwadahi dalam sekolah ayah yang disebut *Skol Atoni*. Pada Februari 2024, sejumlah 69 perempuan peserta *Skol Bife* Nekamese menamatkan pembelajaran dan diwisuda. Pada 2025, model Sekolah Perempuan di Desa Neke ini direplikasi dan dikembangkan di desa-desa lain di Kabupaten Timor Tengah

Selatan melalui kolaborasi antara ICRAF Indonesia, Pemkab TTS, GMIT Klasis Amanuban Tengah Utara, serta mitra lainnya. Kolaborasi ini telah menghasilkan panduan Sekolah Perempuan yang telah dilatihkan kepada 174 fasilitator (160 perempuan, 14 laki-laki) untuk mendampingi masing-masing kelompok sekolah perempuan. Pada akhir 2025, sekitar 38 sekolah perempuan beranggotakan 812 peserta di 28 desa telah terbentuk dan tercatat ada 25 kelompok *Skol Bife* yang aktif berkegiatan. Pada September 2026, sejumlah 682 peserta sekolah perempuan telah menyelesaikan pembelajaran dan diwisuda.

2.6 Upscaling dan outscaling

Untuk memperluas jangkauan manfaat dan memastikan keberlanjutan setelah proyek berakhir, dilakukan dua pendekatan, yaitu: 1) kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan LSM lokal, serta 2) integrasi pendekatan, materi pembelajaran, dan pedoman teknis ke dalam program-program pemerintah daerah yang relevan sehingga dapat diimplementasikan secara berkelanjutan melalui sistem pelayanan yang telah ada.

Kemitraan dengan organisasi mitra lokal, yaitu Yayasan Krisna Galensya dan Yayasan Mitra Tani Mandiri (Krisna-YMTM) memperluas jangkauan peningkatan kegiatan praktik pertanian cerdas iklim, akses pasar dan pembiayaan inovatif, serta kampanye perubahan perilaku terkait pangan lokal dan gizi. Kegiatan Krisna-

YMTM ini menjangkau 24 desa tambahan di Timor Tengah Selatan.

Desa dampingan Land4Lives:

- **Kec. Kota Soe:** Kuatae, Noemoto, Kelurahan Kobekamusa
- **Kec. Mollo Utara:** Fatukoto, Lusmollo, Tunua
- **Kec. Kuatnana:** Tetaf, Enoneontes, Supul
- **Kec. Polen:** Mnesatbubuk, Bijeli, Fatumnutu
- **Kec. Tobu:** Tutem, Bestobe, Tune, Pu'basu
- **Kec. Fatumnasi:** Kuanoel, Fatumnasi
- **Kec. Oenino:** Oenino, Pene Utara
- **Kec. Batu Putih:** Hane, Benlutu
- **Kec. Amanuban Selatan:** Noemuke
- **Kec. Amanuban Barat:** Tubuhue

Pertanian Cerdas Iklim dan Kewirausahaan

Dalam angka:

Hingga Juni 2026, praktik PCI telah direplikasi pada

52

kelompok belajar di 24 desa dampingan Krisna-YMTM

melibatkan **1.191** anggota (39% perempuan)



52

kebun belajar dan kebun dapur, serta 25 pembibitan

yang dibangun sebagai hub pembelajaran berbasis kelompok



Praktik PCI telah didiseminasi melalui berbagai kanal, mulai dari



LPP-RSPD Soe



sekolah lapang dan studi banding dari pemerintah daerah lain



organisasi masyarakat lain di NTT



38

kelompok usaha hortikultura

yang terdiri dari **587** anggota (49% di antaranya perempuan) terbentuk dan terhubung dengan pasar



305

peserta (51% perempuan)

menerima pelatihan mengenai skema pembiayaan inovatif, manajemen usaha, dan pembukuan dasar.



2

skema pembiayaan inovatif

yakni Koperasi Serviam dan Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) bersedia menyediakan pinjaman berupa tunai maupun barang (in-kind/natura) dengan suku bunga terjangkau yakni di bawah 3%

Hingga Juni 2026, Krisna-YMTM telah mereplikasi pendekatan pelatihan PCI pada 52 kelompok belajar yang tersebar di 24 desa, melibatkan 1.191 anggota (39% perempuan). Pelatihan dilaksanakan dalam 3 seri dengan satu topik khusus, yaitu konservasi air pada tingkat rumah tangga. Kegiatan berpusat pada 52 kebun belajar dan 25 pembibitan yang dibangun bersama masyarakat.

Praktik-praktik baik dan cerita dari tingkat tapak juga kemudian dipublikasikan secara lebih luas melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Pemerintah Daerah (LPP-RSPD) Soe. Selain itu, diseminasi ke berbagai desa lain, lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah lain, serta organisasi lokal dan masyarakat lainnya juga dilakukan untuk memperluas penerapan praktik PCI di Nusa Tenggara Timur.

Dalam hal kewirausahaan, proses *outscaling* atau penyebarluasan inovasi program telah berhasil membentuk 38 kelompok usaha hortikultura yang terdiri atas 587 anggota (49% di antaranya perempuan) guna mendukung produksi dan pemasaran kolektif yang kini terhubung ke pasar, termasuk untuk memasok kebutuhan Dapur MBG. Selain itu, 305 peserta (51% perempuan) telah menerima pelatihan mengenai skema pembiayaan inovatif, manajemen usaha, dan pembukuan dasar, yang turut didukung oleh komitmen Koperasi Serviam dan Usaha Bersama Simpan Pinjam (UBSP) dalam menyediakan pinjaman terjangkau, baik tunai maupun barang (*in-kind/natura*), dengan suku bunga di bawah 3%.

Melengkapi capaian tersebut, upaya *upscaling* untuk mengintegrasikan inovasi program ini ke dalam kebijakan yang lebih tinggi juga telah membuahkan hasil. Dukungan kelembagaan ini mencakup arahan DPMD Kabupaten TTS agar Dana Desa digunakan untuk program ketahanan pangan—seperti pembelian pupuk organik—serta komitmen DPMD dalam memberikan asistensi finalisasi RKPDes. Kebijakan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Camat yang menjamin kelancaran suplai bahan baku dan mendorong 18 desa di bawah Kecamatan Mollo Utara untuk membeli pupuk organik produksi kelompok usaha binaan Program Land4Lives, serta memastikan bahwa pengadaan pupuk organik tersebut akan terakomodasi dalam perencanaan desa tahun 2027 melalui Musyawarah Desa (Musdes) pada akhir tahun ini.



Foto oleh Landscape Alliance

Ketahanan Pangan

Dalam angka:

1.086 orang
(65% perempuan)

meningkatkan pengetahuannya melalui kampanye pangan lokal dan gizi bersama mitra lokal Krisna dan YMTM, serta terbentuknya 25 kebun pangan komunal tambahan sebagai pusat pembelajaran masyarakat.



23
desa

menerapkan pendekatan kebun pangan berbasis masyarakat melalui Program **Desa B2SA dan Pekarangan Pangan Bergizi** bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas TPHP, dengan **286** penyuluh, kader, dan fasilitator terlatih melalui ToT dan praktik lapangan, serta didukung pedoman teknis dan materi penyuluhan yang disusun bersama pemerintah daerah.



37

Puskemas

27

Gereja

mengintegrasikan pesan gizi seimbang dan pangan lokal ke dalam layanan rutin melalui Isi Piringku Lokal dan GASELOR Pangan dan Gizi, didukung oleh 114 tenaga kesehatan dan kader, 62 pemuka agama, serta lebih dari 40 Duta Ayah sebagai agen perubahan.



Kampanye pangan lokal dan gizi yang dilaksanakan bersama mitra lokal hingga Juni 2026 telah meningkatkan pengetahuan 2.629 orang, dengan 65% di antaranya perempuan, serta mendukung pembentukan 25 kebun pangan komunal tambahan sebagai pusat pembelajaran masyarakat.

Sejak tahun 2024, pembelajaran di tingkat masyarakat telah diintegrasikan ke dalam berbagai program pemerintah yang sudah berjalan. Pendekatan ini memastikan bahwa praktik-praktik yang telah terbukti efektif dapat terus diimplementasikan melalui sistem pemerintah daerah dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Melalui Program Pengembangan Desa B2SA dan Pekarangan Pangan Bergizi, bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas TPHP, pendekatan kebun pangan berbasis masyarakat diterapkan di 23 desa. Sebanyak 286 penyuluh, kader, fasilitator, dan anggota masyarakat memperoleh pelatihan *Training of Trainers* (ToT) serta praktik lapangan mengenai pengelolaan kebun pangan berkelanjutan, termasuk produksi benih, penggunaan pupuk organik, pestisida nabati, serta budi daya yang adaptif terhadap perubahan iklim. Pedoman teknis dan materi penyuluhan juga disusun bersama pemerintah daerah sebagai acuan bagi pelaksana dan perluasan program.



Foto oleh Landscape Alliance

Melalui Isi Piringku Lokal, bersama Dinas Kesehatan, pedoman konsumsi pangan berbasis pangan lokal diintegrasikan ke dalam layanan rutin di 37 puskesmas. Sebanyak 49 tenaga kesehatan dan 35 kader masyarakat memperoleh pelatihan untuk mengintegrasikan pesan mengenai gizi seimbang, diversifikasi pangan, dan pemanfaatan pangan lokal ke dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu, serta kegiatan promosi kesehatan.

Selain itu, Gerakan Ayah sebagai Konselor Pangan dan Gizi (GASELOR Pangan dan Gizi) dikembangkan bersama Dinas Kesehatan, Dinas P3A, dan Gereja GMIT, serta berupaya meningkatkan keterlibatan ayah dalam pemenuhan gizi keluarga melalui 37 puskesmas dan 27 gereja.

Program ini didukung oleh 30 tenaga kesehatan, 62 pemuka agama, serta lebih dari 40 Duta Ayah yang berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong pembagian peran yang lebih setara dalam pengasuhan dan pemenuhan gizi keluarga.

Melalui penguatan kapasitas pelaksana, penyusunan pedoman, dan integrasi ke dalam sistem pemerintah daerah, Land4Lives memperkuat kepemilikan pemerintah atas berbagai inovasi yang dikembangkan sekaligus menyediakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan dan perluasan manfaat setelah berakhirnya proyek.

Mulok Pangan Lokal

Dalam angka:

30+ Sekolah dan **2.000** murid

menjadi lokasi uji coba kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim” bersama Dinas Pendidikan TTS, dengan 20 guru dan tim pengembang kurikulum terlatih;



Tahun ajaran

2026/2027

seluruh SD dan SMP di TTS telah mendapatkan pelatihan mulok untuk diterapkan di sekolah masing-masing.



Selain itu, untuk menanamkan kesadaran pangan lokal pada generasi muda, dilakukan dengan mendorong pendidikan pangan lokal sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan masyarakat yang diujicobakan pada lebih dari 30 sekolah dan 2.000 murid. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Land4Lives mengembangkan kurikulum muatan lokal “Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim” yang mengintegrasikan pengetahuan tentang pangan lokal, gizi, perubahan iklim, dan pemanfaatan sumber daya lokal ke dalam proses pembelajaran di sekolah.

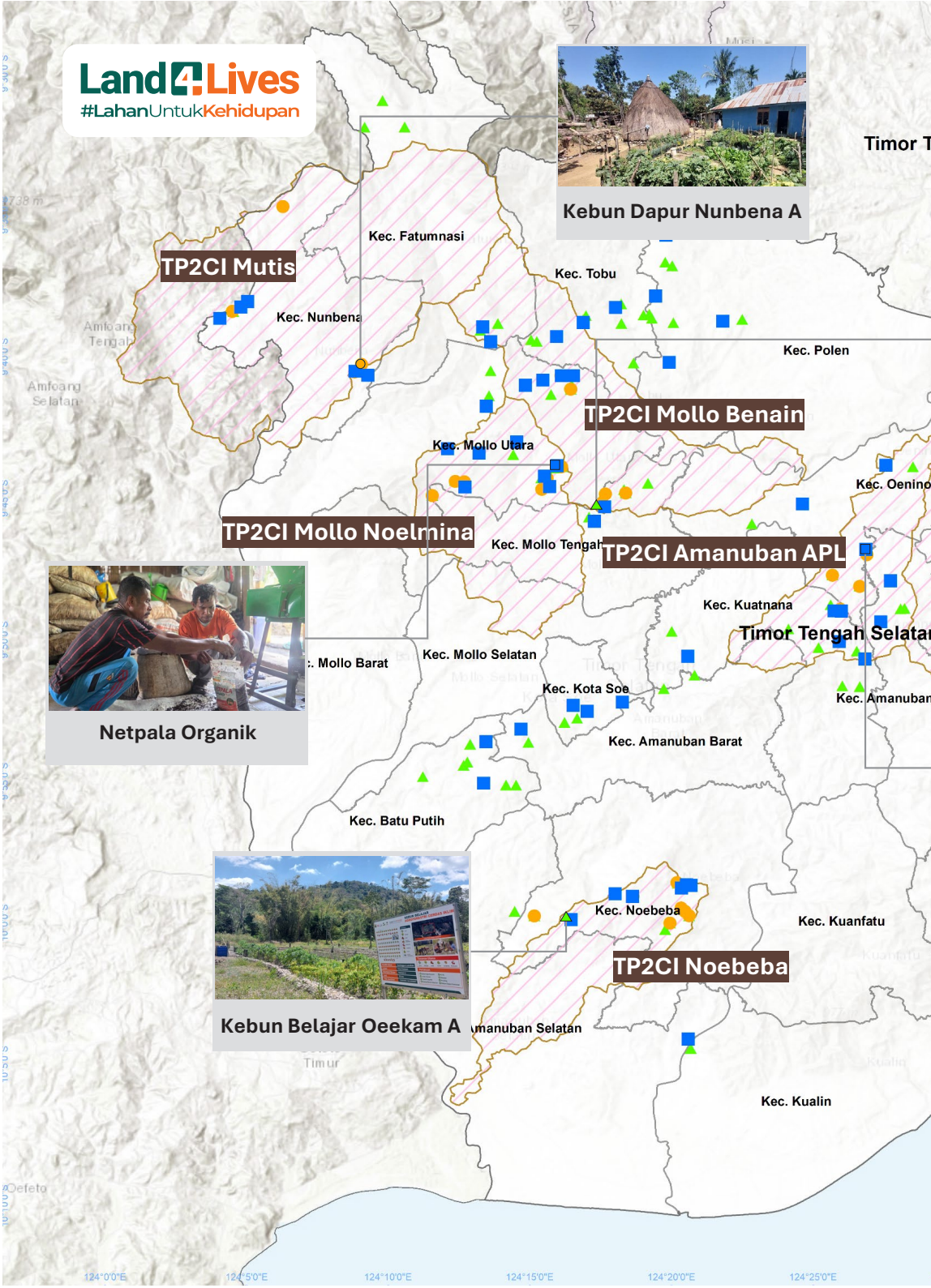
Untuk mendukung implementasinya, 20 guru dan tim pengembang kurikulum memperoleh pelatihan mengenai materi pembelajaran, metode pengajaran partisipatif, serta pemanfaatan konteks lokal sebagai media pembelajaran.

Kurikulum ini kemudian dipilotkan di sekolah-sekolah di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran sejak dini mengenai pentingnya pangan lokal, pola konsumsi yang sehat, serta ketahanan pangan dan ketahanan iklim. Pada tahun ajaran 2026/2027, seluruh SD dan SMP sudah mendapatkan pelatihan mengenai mulok ini untuk diterapkan di sekolahnya.

Dengan menghubungkan pembelajaran di masyarakat, penguatan sistem pemerintah, dan pendidikan di sekolah, Land4Lives membangun fondasi yang lebih kuat bagi keberlanjutan ketahanan pangan serta mendorong lahirnya generasi yang lebih memahami dan menghargai potensi pangan lokal di daerahnya.



Foto-foto oleh Landscape Alliance



Gambar 2. Peta sebaran kebun belajar, kebun usaha dan kebun dapur.

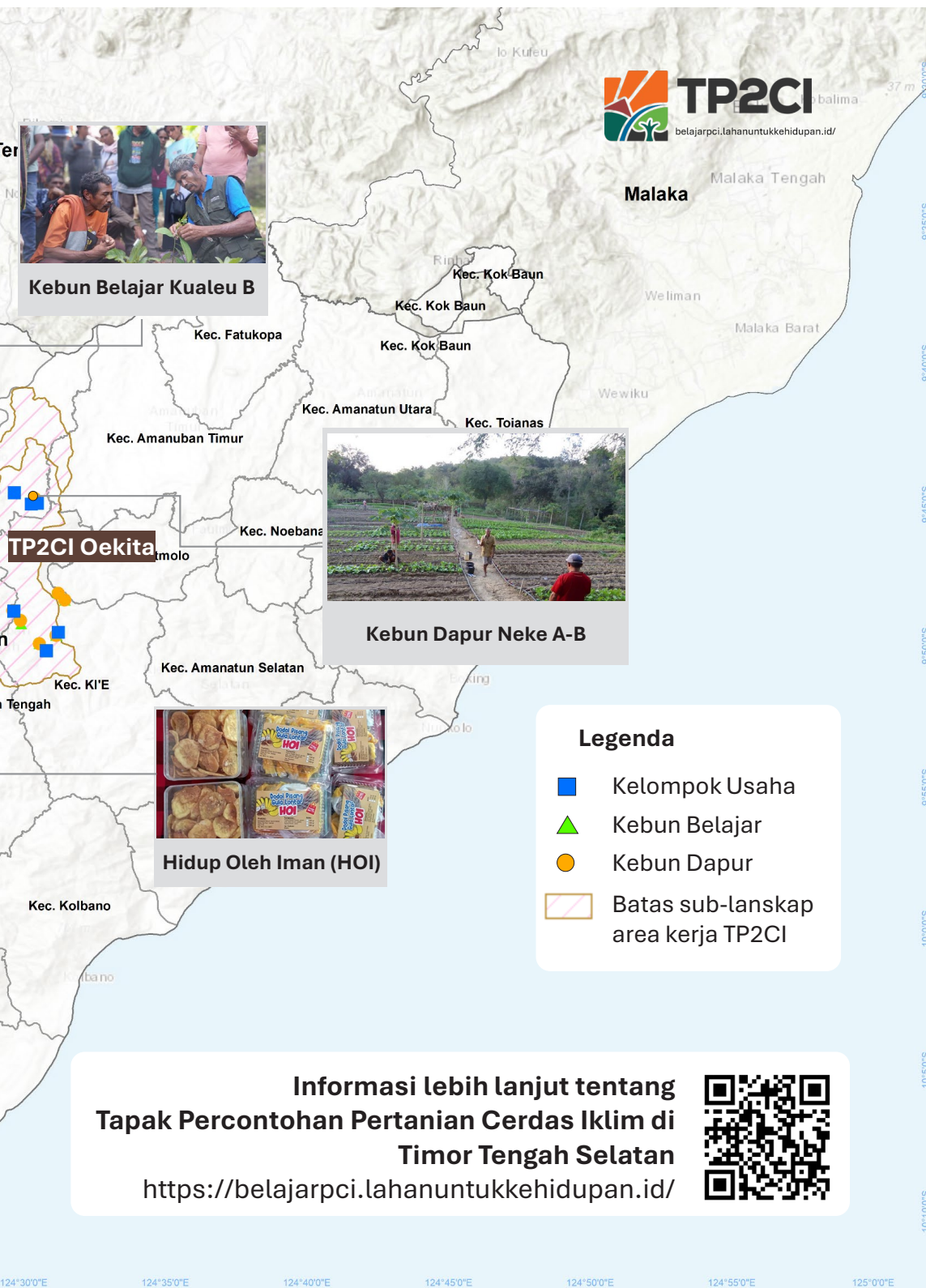




Foto oleh Landscape Alliance

03 Menata Bentang Lahan, Membangun Kebijakan Terpadu

3.1 Kelompok kerja multipihak pengelolaan bentang lahan berkelanjutan

Dalam angka:

Terbentuknya satu
**Kelompok Kerja (Pokja)
Bentang Lahan**

43

anggota

3

gugus tugas

sebagai motor penggerak, mulai dari penyusunan dokumen *Management Plan* hingga menjadi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan lain, seperti TP2CI dan pelatihan pengelolaan bentang lahan.

Kolaborasi dengan
Forum DASNTT

dalam penyusunan dokumen RPDAS Benain dan Noelmina.

826

Orang
(36% perempuan)

terlibat aktif dalam proses perumusan Pokja dan penyusunan dokumen RPDAS

Untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada dan menuju tata kelola serta pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil dalam memenuhi kebutuhan perempuan maupun laki-laki, salah satu langkah pertama Land4Lives dalam bekerja di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah memperkuat tata kelola kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Multipihak untuk Pengelolaan Bentang Lahan Berkelanjutan, serta bekerja sama dengan forum yang sudah ada, seperti Forum DAS.

Proses yang Land4Lives lalui dalam membentuk kelompok kerja, di antaranya:

- **Inisiasi dan institusionalisasi:** memfasilitasi proses pembentukan struktur baru maupun penguatan dan penajaman fungsi Kelompok Kerja (Pokja) yang sudah ada.
- **Penyelarasan visi dan penguatan kepemilikan lintas sektor:** menyelenggarakan lokakarya partisipatif yang mencakup identifikasi isu dan penetapan skala prioritas, serta pencapaian

konsensus untuk memperkuat rasa memiliki dan kolaborasi antar sektor.

- **Pemetaan peran pemangku kepentingan:** melakukan

analisis komprehensif terhadap pembagian peran dan kewenangan *stakeholders* utama di tingkat bentang lahan maupun sub-bentang lahan dengan menerapkan metode Matriks RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*).

- **Penyusunan struktur gugus tugas:** membangun konsensus

bersama terkait struktur kelembagaan, penunjukan anggota tetap, serta perumusan strategi rekrutmen untuk penambahan anggota baru sesuai kebutuhan.

- **Perumusan rencana kerja**

terpadu: menyusun rencana kerja operasional Pokja yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Daerah (Pemda), serta memastikan seluruh program selaras dengan mandat dan target pembangunan daerah.

- **Peningkatan sinergi tingkat provinsi dan kabupaten:** menjalin kolaborasi Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui proses tersebut, terbentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bentang Lahan dengan 43 anggota dan 3 gugus tugas sebagai motor penggerak dalam berbagai kegiatan di bentang lahan — mulai dari penyusunan Management Plan sub-bentang lahan hingga TP2CI. Salah satu capaian kunci Pokja ialah kolaborasi dengan Forum DAS NTT dalam menyusun dokumen RPDAS Benain dan Noelmina. Sebanyak 826 orang (36% perempuan) terlibat aktif dalam proses perumusan Pokja dan penyusunan dokumen RPDAS.

Kolaborasi ini memberikan kontribusi nyata dalam penyusunan dokumen perencanaan pada tingkat bentang lahan, seperti Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS), khususnya untuk DAS Noelmina dan DAS Benain, serta pada tingkat sub-bentang lahan, seperti dokumen *Management Plan* (MP).



Foto oleh Landscape Alliance

3.2 Penyediaan data dan analisis berbasis sains untuk pengelolaan bentang lahan

Dalam angka:

4 Laporan Kajian Kapasitas Penyangga DAS

telah selesai disusun dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan strategis lanskap—RPDAS (Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai)

1 Database terintegrasi

telah disusun yang memuat data mentah dan hasil analisis/kajian

Sebagai respons terhadap tantangan fluktuasi sumber daya air, Land4Lives telah mengintegrasikan pemahaman ekologis yang komprehensif ke dalam implementasi tata kelola lanskap. Integrasi ini didasarkan pada tiga pilar analisis utama:

- Evaluasi kerentanan komunitas melalui pendekatan *Capacity Strengthening Approach for Vulnerability Assessments* (CASAVA): mengkaji kerentanan di tingkat tapak dan merumuskan strategi adaptasi berbasis masyarakat.
- Perumusan strategi kolaboratif dengan kerangka *Forest and Landscape Restoration Assessment* (FLORAS): menetapkan area prioritas dan opsi restorasi lanskap melalui FGD, tinjauan kebijakan strategis, serta analisis spasial.
- Pemodelan hidrologi menggunakan model *Soil and Water Assessment Tool* (SWAT): mengevaluasi kondisi hidrologis dan daerah resapan air melalui simulasi *ex-ante* sebagai landasan tata kelola.

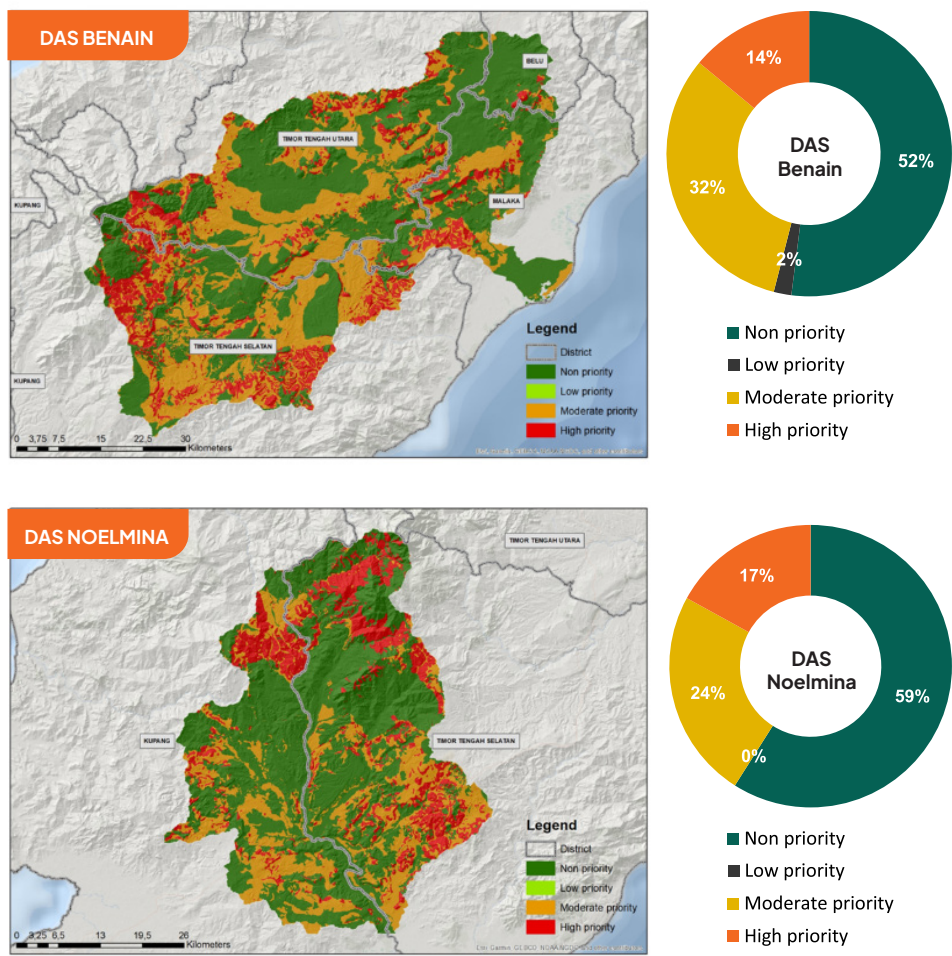
Integrasi dari ketiga dimensi pengetahuan ini diformulasikan ke dalam tahapan analisis berikut:

● Analisis Kerentanan Komunitas di Tingkat Tapak (CASAVA)

Tahapan ini dilakukan melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) secara langsung di tingkat desa untuk memetakan problematika sumber daya air. Secara deskriptif, krisis air di musim kemarau dipicu oleh tingginya permintaan yang tidak sebanding dengan curah hujan, serta masifnya aktivitas antropogenik di wilayah hulu—seperti perambahan, pembukaan lahan, dan kebakaran hutan di Gunung Mutis—yang berdampak langsung pada erosi dan banjir di wilayah hilir. Meskipun masyarakat telah mempraktikkan beberapa strategi mitigasi dan adaptasi mandiri (seperti penyaringan air dan penanaman pohon), upaya adaptasi lain, seperti pendalaman sumur, pembangunan embung, dan pengadaan teknologi pengolahan air bersih, juga masih diperlukan.

● **Analisis Area Prioritas Restorasi (FLORAS)**
Penentuan area prioritas dilakukan secara partisipatif melalui FGD bersama para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan untuk menilai tingkat urgensi restorasi spasial. Analisis ini menggunakan kombinasi berbagai unit perencanaan dasar, meliputi status lahan kritis, dinamika perubahan tutupan lahan, hingga tingkat kerawanan bencana. Hasil evaluasi spasial

menunjukkan bahwa kawasan terbagi ke dalam beberapa kelas prioritas, di mana pada DAS Benain 14% kawasan masuk dalam kategori prioritas tinggi dan 32% dalam kategori prioritas sedang, sementara 52% lainnya merupakan kawasan nonprioritas. Pada DAS Noelmina, area dengan prioritas tinggi tercatat mencapai 17%, prioritas sedang 24%, dan sisanya 59% berada dalam kawasan nonprioritas.

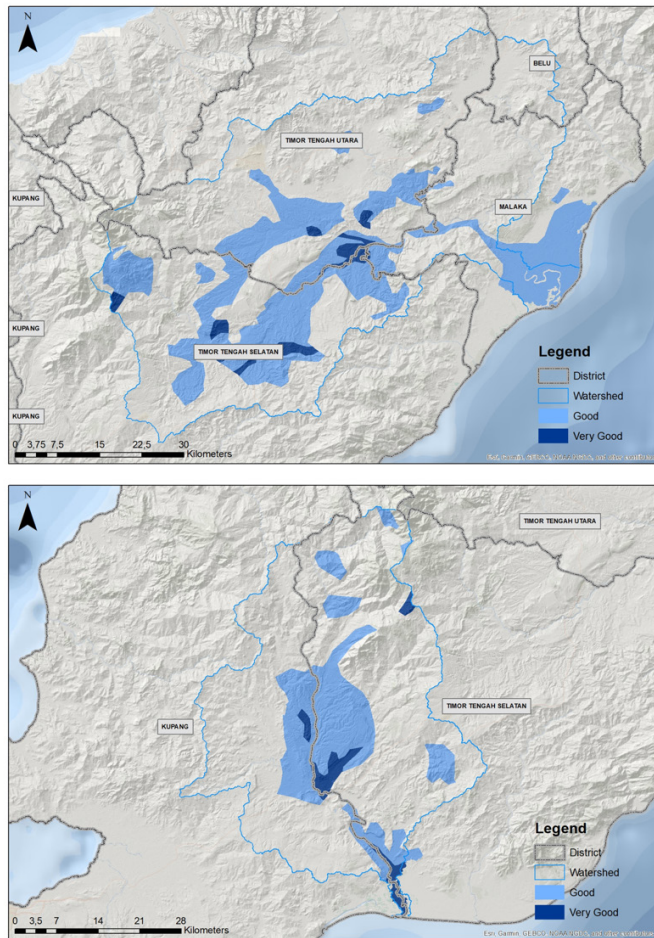


Gambar 3. Area Prioritas Restorasi DAS Benain (A) dan Noelmina (B)

● Analisis Potensi Resapan Air Tanah

Kajian hidrologis ini dilakukan menggunakan analisis spasial dengan melakukan *overlay* pada sejumlah *layer* biofisik esensial, seperti kondisi tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah/batuan, dan struktur kelurusan (*lineament*). Melalui metode pembobotan berdasarkan *expert judgement*, analisis ini memetakan kelas potensi resapan air secara definitif. Hasilnya mengestimasi bahwa pada DAS Noelmina, area potensi resapan berada pada

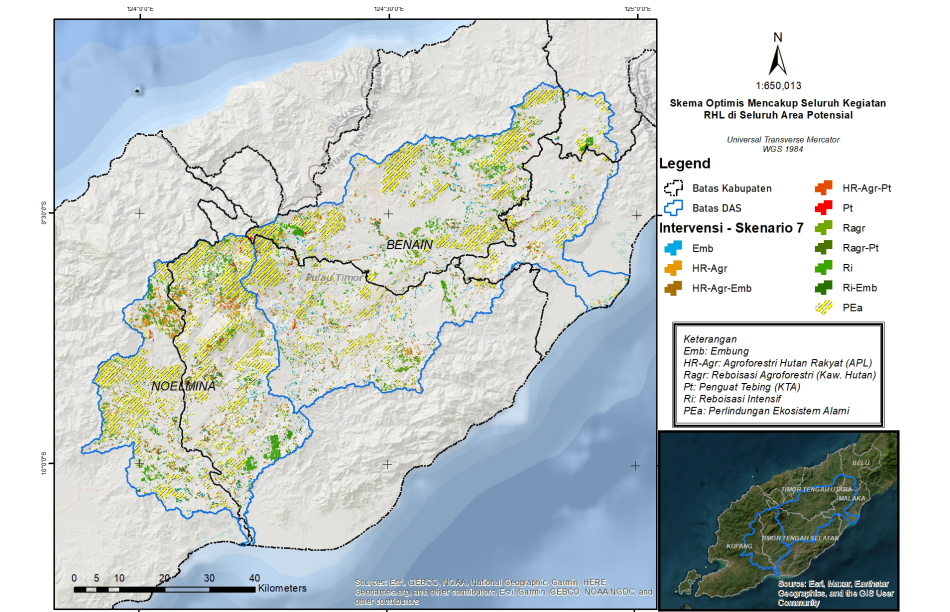
kelas Sangat Baik (Prioritas I) seluas 392 km² dan kelas Baik (Prioritas II) seluas 58 km², yang tersebar melintasi Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang. Sementara itu, untuk wilayah DAS Benain yang mencakup area Cekungan Air Tanah (CAT) Besikama, Oemeu, dan Mina, teridentifikasi area potensi resapan Sangat Baik seluas 71 km² dan potensi Baik seluas 921 km² yang menjangkau Kabupaten TTS, Malaka, dan TTU.



Gambar 4. Area Potensi Resapan Air DAS Benain (atas) dan Noelmina (bawah)

- **Pengembangan Skenario Perbaikan Pengelolaan DAS**
Skenario tata kelola bentang lahan dirumuskan melalui sintesis aspirasi FGD yang dipadukan secara harmonis dengan koridor kebijakan Permen LHK No. 10 Tahun 2022. Integrasi ini menghasilkan berbagai opsi intervensi berbasis lahan (*land-*

based), seperti Konservasi Tanah dan Air (KTA), agroforestri, reboisasi, dan pembangunan embung. Skenario terbaik yang berhasil diformulasikan (Skenario 7) bertumpu pada “Intensifikasi Agroforestri dan Reboisasi Intensif di kawasan hutan dan non-hutan, konservasi tanah dan air untuk menstabilkan lereng, konstruksi



Watershed	Districts	Area of Reboisasi (Ha)	Area of Penguat Tebing (Ha)	Area of Agroforestri (Ha)		Area of Perlindungan Ekosistem Alami	Total
		Ri	Pt	HR-Agr	Ragr	PEa	
Benain	Belu	514	1	17	0	2340	2872
	Malaka	689	37	944	103	5979	7752
	Timor tengah selatan	2.660	300	3.229	1360	16508	7549
	Timor tengah utara	5.859	235	2.879	1694	30038	10667

Based on scenario 7

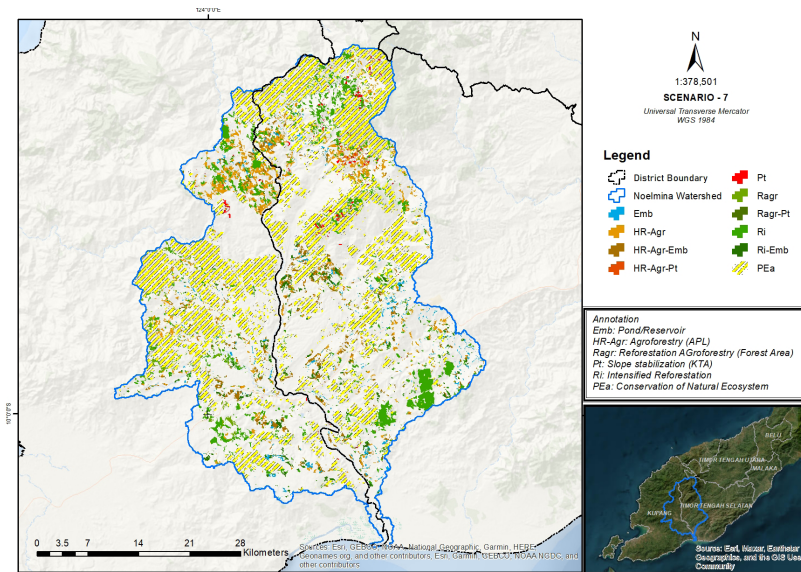
Watershed	Number of reservoir (village)		
	Small	Medium	Large
Benain	107	32	17

Volume of reservoir (m³): small 10,000; medium 50,000; large 100,000
Capacity of reservoir (ha): small > 100; medium 50 - 100; large 10–50

Gambar 5. Area Rencana Perbaikan Pengelolaan DAS Benain

waduk, serta perlindungan ekosistem alami". Secara spesifik, intervensi di DAS Benain merencanakan reboisasi seluas 9.722 ha, agroforestri melebihi 10.000 ha, dan perlindungan ekosistem alami seluas 54.865 ha, didukung oleh pembangunan 107 embung kecil, 32 embung sedang, dan 17 embung besar.

Adapun di DAS Noelmina, dirancang reboisasi seluas 11.592 ha, agroforestri lebih dari 9.000 ha, perlindungan ekosistem alami mencapai 53.242 ha, serta fasilitas berupa 25 embung kecil, 19 embung sedang, dan 18 embung besar.



Watershed	Districts	Area of Reboisasi (Ha)	Area of Penguat Tebing (Ha)	Area of Agroforestri (Ha)		Area of Perlindungan Ekosistem Alami	Total
		Ri	Pt	HR-Agr	Ragr	PEa	
Noelmina	Kupang	4.436	121	3.846	606	21777	9009
	Timor tengah selatan	7.156	554	4.702	22	31465	12434
	Timor tengah selatan	2.660	300	3.229	1360	16508	7549
	Timor tengah utara	5.859	235	2.879	1694	30038	10667

Based on scenario 7

Watershed	Number of reservoir (village)		
	Small	Medium	Large
Noelmina	25	19	18

Volume of reservoir (m³): small 10,000; medium 50,000; large 100,000
Capacity of reservoir (ha): small > 100; medium 50 - 100; large 10-50

Gambar 6. Area Rencana Perbaikan Pengelolaan DAS Noelmina

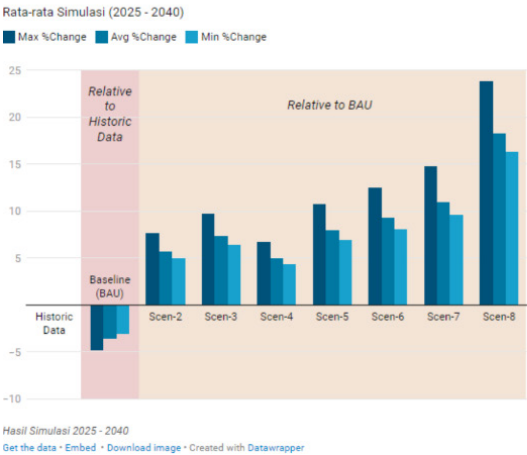
● Analisis Ex-ante Kapasitas Penyangga DAS

Untuk mengukur efektivitas rencana pengelolaan, dilakukan uji simulasi terhadap 8 skenario perbaikan menggunakan perangkat *Soil and Water Assessment Tool* (SWAT), dengan parameter model yang telah dikalibrasi dan divalidasi silang dari lokasi DAS lain untuk mengatasi keterbatasan data lapangan. Luaran pemodelan memproyeksikan bahwa tanpa adanya tindakan intervensi sama sekali (*Business as Usual*), kapasitas penyangga DAS akan terus mengalami tren degradasi jika dibandingkan dengan data

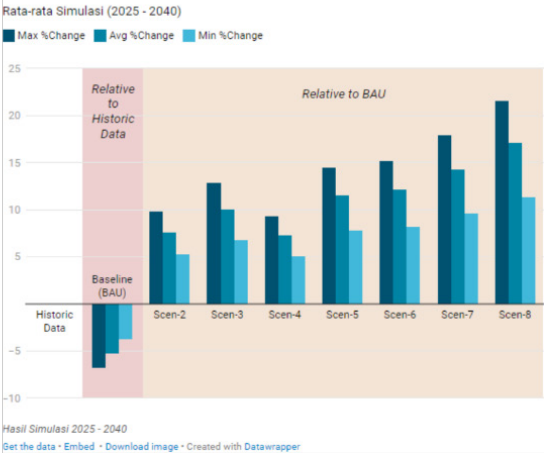
historis. Di DAS Noelmina, ragam skenario perbaikan memberikan peningkatan kapasitas penyangga pada kisaran 7–14%. Temuan serupa terjadi di DAS Benain, di mana implementasi tata kelola mampu meningkatkan kapasitas sebesar 4–10%.

Melalui proses tersebut, 4 Laporan Kajian Kapasitas Penyangga DAS disusun dan diintegrasikan ke dalam RPDAS (Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Data mentah serta hasil analisis/kajiannya dimuat dalam 1 database terintegrasi.

Perubahan Buffering Indicator Setiap Skenario - DAS BENAIN



Perubahan Buffering Indicator Setiap Skenario - DAS NOELMINA



Gambar 7. Persentase Perbaikan Kapasitas Penyangga DAS Benain (kiri) dan Noelmina (kanan) di Berbagai Skenario

3.3 Peningkatan kapasitas pengelola bentang lahan

Dalam angka:

1.558 orang
(48% perempuan)

telah dilatih dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan bentang lahan berkelanjutan melalui solusi berbasis alam (NbS), termasuk penerapan praktik pengelolaan lahan tanpa pembakaran.

252 orang
(37% perempuan)

terlibat aktif dalam proses penyusunan dokumen *management plan*.

6 dokumen **Management Plan (MP)**

telah dihasilkan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan wilayah.

Pengelolaan bentang lahan berbasis alam menjadi salah satu materi bagi

39 kelompok **Sekolah Perempuan**

di Kabupaten TTS-NTT.

Untuk membawa hasil kajian ke dalam implementasi, Land4Lives juga merespons tantangan berupa kesenjangan pemahaman warga tentang pengelolaan lahan yang berwawasan lingkungan melalui edukasi. Program edukasi dan peningkatan kesadaran berfokus pada pengelolaan lahan dengan solusi berbasis alam, praktik pertanian cerdas iklim (*Climate-Smart Agriculture/CSA*), pengelolaan lahan tanpa membakar (*zero burning*), serta akses terhadap lahan melalui skema perhutanan sosial. Intervensi ini berhasil meningkatkan kesadaran para pihak tentang dampak dinamika tata guna lahan terhadap fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) serta ketahanan ekonomi.

Lebih lanjut, Land4Lives juga berproses bersama untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam menyusun dokumen perencanaan pada tingkat sub-bentang lahan. Beberapa pelatihan dan lokakarya yang telah diselenggarakan, di antaranya:

- **Pelatihan mengenai pengelolaan lahan dengan solusi berbasis alam**, termasuk sistem pemanenan air hujan, menggunakan pendekatan permainan *H₂Ours*.
- **Pelatihan mengenai teknik pengelolaan lahan tanpa bakar**, Pertanian Cerdas Iklim (CSA), serta akses lahan untuk perhutanan sosial.

- **Penyusunan dokumen rencana pengelolaan sub-bentang lahan—*Management Plan (MP)*—** melalui pendekatan partisipatif, yang melibatkan serangkaian *Focus Group Discussion (FGD)* bersama forum multipihak. Rencana pengelolaan sub-bentang lahan telah disusun untuk mewujudkan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dengan memperkuat strategi perencanaan, tata kelola, pendanaan, dan pemantauan di seluruh kawasan hutan (konservasi, lindung, produksi) serta Area Penggunaan Lain (APL). Strategi yang diterapkan meliputi konservasi dan restorasi serta pemanfaatan berkelanjutan yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Melalui capaian tersebut, Land4Lives juga telah berhasil meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Peningkatan kapasitas ini sukses membekali peserta dengan pengetahuan praktis tentang pengelolaan bentang lahan melalui solusi berbasis alam, penerapan Pertanian Cerdas Iklim (CSA), tata cara mengakses lahan melalui skema perhutanan sosial, serta perencanaan bentang lahan secara partisipatif. Peningkatan literasi ini tidak hanya ditujukan agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna lahan, melainkan juga menjadi pengambil keputusan yang teredukasi, mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, sekaligus berkontribusi aktif dalam adaptasi dan mitigasi iklim serta perlindungan lingkungan jangka panjang.



Foto oleh Landscape Alliance

3.4 Perencanaan pengelolaan kawasan hutan

Dalam angka:

1 dokumen RPHJP KPH
Timor Tengah Selatan

yang telah disahkan

184 peserta
(31% perempuan)

terlibat dalam proses penyusunan
dokumen RPHJP

Pengelolaan kawasan hutan Kabupaten TTS diatur melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten TTS dengan luas wilayah kelola mencapai sekitar 137.165 ha. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) merupakan landasan esensial dalam mewujudkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan. Bersama pemangku kepentingan, Land4Lives memfasilitasi proses penyusunan dokumen RPHJP KPH TTS, yang berfungsi sebagai cetak biru strategis yang memberikan arah operasional sekaligus kepastian hukum bagi pengelolaan kawasan hutan selama sepuluh tahun ke depan melalui tiga pilar utama kehutanan, yaitu kelestarian fungsi ekologis, optimalisasi manfaat ekonomis, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Proses penyusunan dokumen RPHJP di antaranya:

- **Identifikasi dan penentuan isu secara partisipatif:** proses awal ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memetakan potensi sumber daya kawasan

hutan, mengevaluasi kondisi yang ada, serta meninjau regulasi yang berlaku. Hasil temuan di lapangan kemudian dikategorikan ke dalam klaster sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebelum dikerucutkan melalui FGD untuk menetapkan isu-isu prioritas.

- **Perumusan rencana kegiatan strategis:** merupakan tahap perancangan strategi intervensi yang berfokus pada aspek silvikultur dan perlindungan hutan. Strategi ini dijabarkan ke dalam rencana aksi yang meliputi penetapan target reboisasi, penyusunan jadwal patroli pengamanan kawasan, hingga penentuan kuota pemanfaatan/pemungutan hasil hutan secara lestari.
- **Integrasi analisis saintifik:** secara bersamaan dilakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data spasial, pemodelan ekologi, serta valuasi sosial-ekonomi. Analisis ini menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa pembagian blok kelola,



Foto oleh Landscape Alliance

penyusunan rencana bisnis, serta perancangan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tepat.

- **Penyusunan draf dan pelaksanaan konsultasi publik:** draf RPHJP yang telah disusun selanjutnya diajukan ke forum Konsultasi Publik. Proses ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran guna menyempurnakan draf dokumen.
- **Finalisasi dan pengesahan dokumen:** tahap akhir mencakup penyelesaian penyusunan dokumen dan penyerahan usulan

dokumen secara berjenjang melalui Kepala Dinas Provinsi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Melalui proses tersebut, dihasilkan 1 dokumen RPHJP KPH Timor Tengah Selatan, yang telah disahkan. RPHJP memuat pengelolaan bentang lahan dengan strategi intervensi yang terpetakan secara spasial serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Sebanyak 184 peserta (31% perempuan) terlibat dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

3.5 Perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dalam angka:

2 Dokumen RPDAS

RPDAS Benain dan RPDAS Noelmina yang telah disahkan

Proses pengembangan desain melibatkan

388 pemangku kepentingan

yang berbeda yang mewakili pemerintah daerah, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil.

2 Dokumen Peta Jalan

terlibat dalam proses penyusunan dokumen RPHJP

Perbaikan pengelolaan DAS yang tertuang dalam dokumen RPDAS Benain dan Noelmina berpotensi meningkatkan kapasitas penyangga DAS Benain dan Noelmina di Nusa Tenggara Timur sebesar

11–35%

Dua Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melintasi wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) adalah DAS Benain (327.515 ha) dan DAS Noelmina (189.610 ha). Kedua DAS ini terletak di Pulau Timor dan memegang peran vital bagi karakteristik hidrologi Kabupaten TTS. Degradasi fungsi hidrologi akibat degradasi tutupan lahan dan menurunnya kapasitas penyangga DAS merupakan pemicu utama bencana hidrometeorologi, seperti kekeringan, banjir, erosi, hingga tanah longsor. Untuk merespons ancaman tersebut, bersama pemangku kepentingan, Land4Lives memfasilitasi proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan DAS yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS), melalui proses berikut:

- **Identifikasi dan pemilihan isu secara partisipatif:** tahap ini melibatkan para pemangku kepentingan untuk memetakan kondisi aktual dan potensi sumber daya DAS, serta meninjau regulasi atau kebijakan yang berlaku. Hasil identifikasi tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam klaster sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebelum dikurasi secara lebih spesifik melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menetapkan isu-isu prioritas.
- **Perumusan rencana kegiatan strategis:** merupakan proses penyusunan strategi intervensi yang menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan kelembagaan. Strategi ini dituangkan dalam bentuk matriks intervensi yang dipastikan selaras dan terintegrasi dengan program kerja pemerintah daerah.

- **Integrasi analisis saintifik:** secara bersamaan, dilakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang difokuskan pada pemodelan kapasitas penyangga DAS. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan landasan pengembangan desain perbaikan pengelolaan DAS, memastikan setiap intervensi perlindungan dan perbaikan bentang lahan, seperti reboisasi intensif, penerapan konservasi tanah dan air, penghijauan maupun reboisasi melalui agroforestri, pembangunan embung untuk penampungan air hujan, serta perlindungan terhadap ekosistem alami yang tersisa, didasarkan pada data yang akurat, termasuk data iklim, kerawanan bencana, dan tutupan lahan.
- **Penyusunan dokumen dan konsultasi publik:** draf Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) yang telah disusun selanjutnya diajukan ke forum Konsultasi Publik. Proses ini bertujuan untuk menghimpun masukan dan saran guna menyempurnakan draf dokumen.
- **Finalisasi dan pengesahan dokumen perencanaan RPDAS:** tahap akhir mencakup penyelesaian penyusunan dokumen dan penyerahan usulan dokumen final melalui Balai Pengelola DAS (BPDAS) kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan secara resmi.

Melalui proses tersebut, dihasilkan 2 dokumen perencanaan dan 2 dokumen peta jalan RPDAS Benain dan Noelmina. Perbaikan pengelolaan DAS yang tertuang dalam dokumen RPDAS Benain dan Noelmina berpotensi meningkatkan kapasitas penyangga DAS Benain dan Noelmina di Nusa Tenggara Timur sebesar 11–35%

Dengan capaian ini, Land4Lives membekali masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dengan wawasan yang memadai supaya setiap pengambilan keputusan terkait tata guna lahan di masa depan selalu mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan, ekonomi, dan ketahanan iklim.



Foto oleh Landscape Alliance

3.6 Integrasi perencanaan bentang lahan ke program pemerintah

Dalam angka:

1 Dokumen IAD Kabupaten TTS

yang merupakan cetak biru pembangunan wilayah terpadu yang tidak hanya ideal dari perspektif biofisik dan ekologis, tetapi juga layak secara ekonomi dan didukung sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan.

3 Dokumen KLHS

(RTRW Provinsi NTT, RPJP Provinsi NTT, serta RPJP Kabupaten TTS).

2 dokumen RPJMD Provinsi NTT dan Kabupaten TTS)

yang menjabarkan visi, misi, dan program strategis untuk mengarahkan pembangunan dan penganggaran daerah.

Agar strategi-strategi intervensi yang telah dirumuskan dan hasil analisis yang telah dihasilkan dalam dokumen rencana pengelolaan bentang lahan (RPDAS, MP, dan RPHJP) dapat didukung oleh anggaran dan birokrasi, lebih lanjut, strategi-strategi intervensi dan hasil analisis diintegrasikan ke dalam program pemerintah daerah, baik secara langsung maupun melalui dokumen KLHS.

- Opsi strategi intervensi dalam dokumen RPHJP dan MP diarusutamakan ke dalam opsi strategi intervensi dokumen Integrated Area Development (IAD).
- Kerangka penyelesaian isu strategis multisektoral yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan kelembagaan dalam dokumen RPDAS, diintegrasikan ke dalam program pemerintah daerah dalam RPJMD provinsi dan kabupaten, baik secara langsung maupun melalui dokumen KLHS.

Dengan integrasi ini, rencana pengelolaan bentang lahan tidak berhenti sebagai dokumen teknis tetapi juga melekat pada mandat, birokrasi, dan siklus penganggaran pemerintah daerah sebagai penopang keberlanjutan. Ketika prioritas bentang lahan telah tertulis dalam IAD, KLHS, dan RPJMD, upaya pemulihan DAS dan pengelolaan hutan memiliki dasar hukum dan sumber daya untuk terus berjalan melampaui masa kegiatan Land4Lives.



Foto oleh Landscape Alliance

04 Jejak Perubahan dan Dampak Nyata

4.1 Dampak di tingkat tapak

1. Dampak Peningkatan Akses terhadap Budi Daya Cerdas Iklim

- Peningkatan pengetahuan dan adopsi petani, termasuk kelompok perempuan melalui **Sekolah Perempuan**, terhadap praktik budi daya cerdas iklim.
- Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi sumber penghidupan, peningkatan nilai tambah produk olahan, serta perbaikan kualitas dan harga jual komoditas.
- Peningkatan pengakuan dan ketahanan desa melalui terdaftarnya desa-desa binaan Land4Lives sebagai **Desa ProKlim**, yaitu **Netpala, Bijaepunu, dan Lelobatan di NTT**.
- Peningkatan ketahanan desa dalam menghadapi berbagai ancaman serta dampak perubahan iklim.
- Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan kelompok terkait penerapan praktik budi daya cerdas iklim.

- Terbangunnya inisiatif penyebarluasan pengetahuan dan pembelajaran dalam skala bentang lahan melalui **TP2CI (Tapak Percontohan Pertanian Cerdas Iklim)** sebagai pusat pembelajaran dan berbagi pengalaman terkait pertanian cerdas iklim.

2. Dampak Peningkatan Akses Pasar dan Sumber Pembiayaan

- Terbukanya peluang kemitraan dengan pelaku rantai nilai/pasar serta tersalurkannya sarana produksi dari mitra pembiayaan inovatif untuk mendukung pengembangan kapasitas dan usaha kelompok.
- Peningkatan skala usaha melalui dukungan infrastruktur, sarana produksi, hibah peralatan, serta penyediaan bibit.
- Perluasan jaringan kemitraan strategis dengan ritel modern, pedagang besar, industri hilir, eksportir, pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pembiayaan, dan universitas.
- Peningkatan literasi keuangan dan kapasitas bisnis melalui pemahaman skema pembiayaan inovatif, manajemen usaha, serta analisis kelayakan finansial.



Foto oleh Landscape Alliance

- Perluasan akses terhadap permodalan melalui hibah, penguatan kapasitas, penguatan legalitas kelembagaan usaha, sertifikasi produk, pembiayaan bergulir, serta investasi komunal dari berbagai mitra.
 - Penguatan kesetaraan gender melalui peningkatan keterlibatan aktif dan kepemimpinan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dan pengembangan usaha.
 - Peningkatan kepastian hukum, perlindungan usaha, dan kepercayaan konsumen melalui penguatan legalitas usaha dan sertifikasi produk, antara lain P-IRT, Halal, dan HAKI.
 - Perbaikan kualitas lingkungan melalui pemanfaatan dan pengolahan limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi.
-
- 3. Dampak Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan**
- Kurikulum Muatan Lokal “**Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim**” menjadi salah satu contoh pendekatan pembelajaran yang dapat direplikasi dan dikembangkan pada tingkat nasional.
 - **Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)** merekomendasikan agar Dinas

Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota menggunakan pendekatan **Kurikulum Muatan Lokal** sebagai instrumen edukasi pangan lokal secara formal bagi peserta didik di Indonesia. Pendekatan ini mendukung mandat **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal**, serta mengacu pada **Panduan Kurikulum Muatan Lokal Pola Konsumsi Pangan B2SA dan Pangan Lokal** yang disusun bersama oleh Bapanas, Kemendikdasmen, dan ICRAF.

- Pendekatan Land4Lives dalam mendorong pemanfaatan pangan lokal menjadi contoh pembelajaran yang disosialisasikan dalam penyusunan **RAD-PGBPSDL di Medan** dan dapat direplikasi

oleh mitra pembangunan untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.

- Terjadinya transformasi norma gender dan penguatan peran ayah dalam pemenuhan gizi keluarga melalui **Gerakan Ayah sebagai Konselor Pangan (Gaselor)** di NTT.

4.2 Dampak di tingkat bentang lahan

Sebagai wujud implementasi tata kelola bentang lahan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap iklim, intervensi program telah menghasilkan serangkaian capaian strategis yang berdampak positif pada berbagai tingkat. Pendekatan komprehensif yang diterapkan tidak hanya menyentuh aspek teknis dan ekologis, tetapi juga penguatan kapasitas, kelembagaan,



Foto oleh Landscape Alliance

serta pemberdayaan masyarakat. Secara garis besar, keberlanjutan dan manifestasi keberhasilan proyek ini bertumpu pada tiga pilar capaian utama:

- **Replikasi dan pembelajaran.** Penyebarluasan informasi dan pembelajaran semakin cepat di bentang lahan yang luas dan beragam melalui pelatihan interaktif hingga portal web informasi.
- **Tata kelola hutan dan DAS.** Pengelolaan hutan dan DAS dapat dijalankan dan dampaknya dapat diukur dengan baik sesuai dengan indikator yang ada pada RPHJP dan RPDAS. Dialog antarkabupaten mengenai pengelolaan DAS terjalin berbasis RPDAS lintas kabupaten.
- **Inklusi sosial dan keberlanjutan lingkungan.** Pendekatan inklusi sosial dan GEDSI menjadi lebih kuat dalam pengelolaan berbagai jenis lanskap pada ekosistem yang berbeda, melalui inisiatif tingkat tapak, termasuk Sekolah Perempuan. Dampak lingkungan negatif terhadap produktivitas dapat dihindari, sehingga keberlanjutan dan ketangguhan bentang lahan tercapai.

Lebih detail, hasil proses peningkatan pengelolaan bentang lahan untuk kesehatan dan jasa ekosistem yang lebih baik di Kabupaten TTS dan Provinsi NTT, di antaranya:

Lahan dengan pengelolaan yang lebih baik. Luas lahan (ha) dengan pengelolaan yang lebih baik yang secara adil memenuhi beragam kebutuhan perempuan dan laki-laki miskin serta rentan.

- 517.125 ha lanskap dikelola secara lebih baik dan responsif gender, dengan intervensi khusus agar perempuan turut berpartisipasi dan menerima manfaat.
- 2.100 orang (25% perempuan) berpotensi menerima manfaat dari program pengelolaan hutan dan lahan.
- Kapasitas penyangga DAS Benain dan Noelmina berpotensi meningkat masing-masing sebesar 10–15% dan 10–18%.
- 230 orang (10% perempuan) terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan dan lahan.

Kapasitas pengelola lahan.

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

- 1 Pokja Bentang Lahan.
- 1.558 peserta pelatihan (48% perempuan) telah dilatih tentang pengelolaan lanskap berkelanjutan melalui solusi berbasis alam (NbS), termasuk penerapan praktik pengelolaan lahan tanpa pembakaran.
- 2 materi pelatihan pengelolaan lahan dengan pendekatan solusi berbasis alam melalui permainan H₂Ours.



Foto oleh Landscape Alliance

- 1 materi pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar.
- 1 modul restorasi hutan dan lahan.
- 2 *e-learning* tentang penyusunan dokumen RPHJP dan pengelolaan bentang lahan.

Kebijakan dan program restorasi hutan dan lahan. Merumuskan opsi strategi pengelolaan bentang lahan.

- 2 laporan kajian DAS.
- 5 dokumen rencana pengembangan (3 KLHS, 2 RPJMD).
- 12 dokumen rencana sektoral dan tematik yang sensitif terhadap



Foto oleh Landscape Alliance

- gender (MP, RPHJP, RPDAS, Peta Jalan RPDAS, dan IAD).
- 42 *workshop/meeting/FGD* dengan 1.262 peserta (35% perempuan) telah meningkat kapasitasnya serta terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik di tingkat sub-bentang lahan maupun bentang lahan.

Pemberdayaan perempuan.

Penguatan peran perempuan melalui edukasi pengelolaan bentang lahan.

- 39 kelompok Sekolah Perempuan di Kabupaten TTS-NTT mengadopsi materi pengelolaan bentang lahan berbasis alam



Foto oleh Landscape Alliance

05 Arah Keberlanjutan



Foto oleh Landscape Alliance

Proyek Land4Lives telah berhasil memperkuat tata kelola dan pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil dalam memenuhi kebutuhan perempuan maupun laki-laki, termasuk kelompok miskin dan rentan di Nusa Tenggara Timur, melalui kolaborasi aktif antara pengelola dan pengguna lahan. Land4Lives juga telah berhasil meningkatkan ketahanan ekonomi dan iklim dalam hal mata pencaharian serta ketahanan pangan bagi kelompok miskin dan rentan, khususnya

perempuan dan anak perempuan, melalui penerapan pertanian cerdas iklim dan agroforestri. Intervensi ini terbukti efektif dalam meredam dampak perubahan iklim sekaligus mengoptimalkan kualitas jasa ekosistem. Lebih dari itu, inisiatif ini menjamin pemenuhan kebutuhan yang responsif gender bagi kelompok perempuan dan laki-laki di tingkat tapak, secara nyata mendukung peningkatan hasil panen, ketahanan pangan dan gizi, serta mendongkrak pendapatan masyarakat melalui sistem pasar yang lebih baik. Namun,



Foto oleh Landscape Alliance

untuk mencapai target tersebut, Land4Lives berangkat dari situasi awal yang cukup menantang dan menghadapi beragam tantangan baik di tingkat tapak maupun di tingkat bentang lahan.

Sebagai penutup, seluruh capaian Land4Lives selama 2022–2026 dirancang secara khusus untuk mendukung keberlanjutan. Berakhirnya proyek Land4Lives bukanlah titik henti, melainkan awal

dari fase kemandirian. Fondasi yang kuat yang telah dibangun bersama ini siap untuk dilanjutkan. Land4Lives berharap pemerintah dan masyarakat dapat mengambil alih estafet inisiatif ini, serta terus mengoptimalkan capaian yang telah diraih agar dampak positifnya senantiasa berkelanjutan dan semakin meluas di masa depan.

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #LahanUntukKehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Landscape Alliance

Jl. CIFOR, Situ Gede Sindang Barang, Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625415 | landscapealliance.org/locations/asia/indonesia